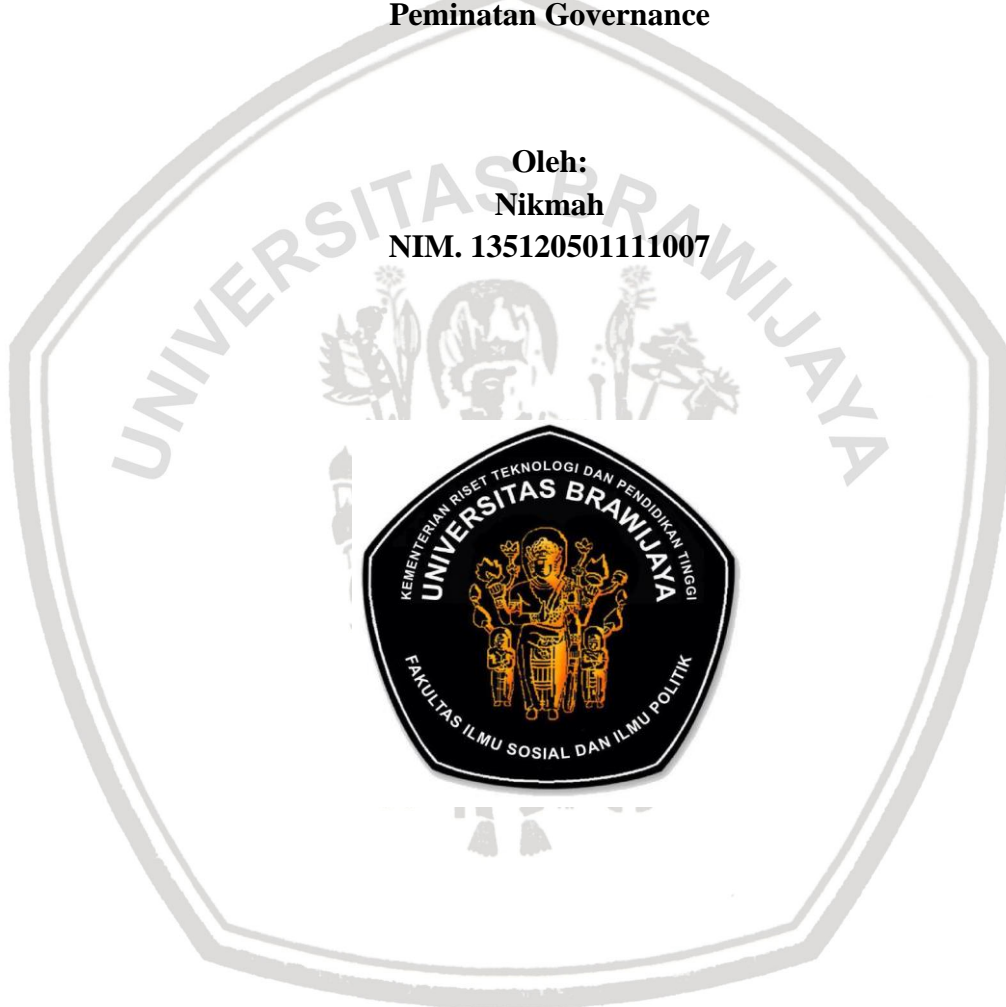


**TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA WISATA (*VILLAGE GOVERNANCE*)
(STUDI KASUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan
Peminatan Governance**

Oleh:
Nikmah
NIM. 135120501111007



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA WISATA (*VILLAGE GOVERNANCE*) (STUDI KASUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nikmah

NIM. 135120501111007

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Komprehensif pada tanggal

25 September 2018

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph. D

NIP. 197408012008011009

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA

NIK. 201607831118 1 001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Amin Heri Susanto, LC., MA., Ph.D

NIK. 201607 750909 1001

Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP

NIK. 201208850707 2 002

Malang, 25 September 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196908141994021001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan di buatnya Surat pernyataan ini saya :

Nama : Nikmah

NIM : 135120501111007

Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas
Brawijaya Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA WISATA (*VILLAGE GOVERNANCE*)
(STUDI KASUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG)**

Merupakan benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang , November 2018

Yang membuat pernyataan,

Nikmah
NIM.135120501111007

MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

(An-Najm 39-41)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA WISATA (*VILLAGE GOVERNANCE*) Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis dengan tujuan menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Berkat dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak dalam penyelesaian studi, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat Yang Maha Agung dan Maha Kuasa yang selalu memberikan jalan dan petunjuk bagi hamba-Nya.
2. Kedua orang tua yang memberikan dukungan terbesar baik moril maupun materil, serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi, Bapak Yudi Amin dan Ibu Saidah, yang selalu menginspirasi disegala aspek kehidupan.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, sekaligus kepada Bapak Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.SI selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
4. Bapak Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan ketersediaannya untuk menuntun dan mengarahkan

- penulis dengan penuh kesabaran hingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak Amin Heri Susanto, LC., MA., Ph.D dan Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP. Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang bertujuan untuk membangun sehingga menjadikan tugas akhir ini lebih baik.
 6. Para tenaga pengajar (dosen) program studi Ilmu Politik serta jajaran yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa tempuh studi penulis.
 7. Mas Budi dan Mas Luthfi selaku bagian administrasi Program studi Ilmu Politik yang banyak membantu dalam proses pembuatan surat-menyurat dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Kepala Desa Pujon Kidul Bapak Udi Hartoko beserta para staff yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sebagai bahan utama dalam penulisan tugas akhir ini.
 9. Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus Manager Marketing objek wisata café sawah Pujon Kidul yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sebagai bahan utama dalam penulisan tugas akhir ini.
 10. Muhammad Yusuf Akbar yang tak henti memberikan doa dan dukungan kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini
 11. Para sahabat yang menjadi keluarga Penulis selama Penulis menempuh study di Malang, “Keluarga Cendrawasih”: Ilfi Fitria Arfaini Widya Putri, Fitri Amalia, Siti Wahyuni, Margaretha Wulandari, Eka Putri Enggar, Nazil

Afifatun Nikmah, dan teman-teman serta sahabat Penulis yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Mbak Irmalia Ratnasari yang sudah seperti saudara bagi penulis yang telah bersedia membantu Penulis memberikan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat dan tidak menyerah.
13. Keluarga besar Ilmu Politik angkatan 2013 Universitas Brawijaya Malang yang telah mengisi dan mewarnai masa perkuliahan dengan kenangan-kenangan indah.

Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga segala hal yang kalian berikan adalah suatu bentuk motivasi diri bagi penulis, yang mampu menjadikan pengalaman penulis untuk menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, civitas akademik FISIP Universitas Brawijaya, khususnya Program Studi Ilmu Politik. Penulis meyakini bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Malang, 2018

ABSTRAK

Nikmah, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata (*Village Governance*), Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Tim Pembimbing: Wawan Sobari, S.IP.,MA.,Ph.D, dan Ibnu Asqori Pohan,S.Sos.,MA

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana tata kelola pemerintahan di Desa Pujon Kidul terkait pengelolaan potensi wisata yang melimpah yang dimiliki Desa Pujon Kidul, baik dari bidang pertanian, peternakan, alam, maupun seni/budaya yang di kemas menjadi sebuah konsep Desa Wisata yang bertujuan untuk dapat mencapai kesejahteraan bagi Desa dan masyarakatnya dengan mengkaitkan tata kelola pemerintahan desa wisata dengan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen dan website yang dianalisis menggunakan teknik penjadwalan pola dan pembuatan eksplanasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan strategi eksplanatoris karena dalam penelitian ini lebih banyak informasi yang dibutuhkan dengan pertanyaan “bagaimana”.

Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam penelitian ini mencakup 3 aspek yang diperlukan dalam pengelolaan Desa Wisata, yaitu mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi keputusan, serta mencakup pula dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat Desa.

Hasil analisis dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa tata kelola Desa Wisata di Desa Pujon Kidul berjalan baik dikarenakan adanya kepemimpinan Kepala Desa dengan menjalankan Pemerintahan Desa Wisata berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah desa, kegiatan pemetaan, serta kegiatan tahlil kubro dan dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat karena kurangnya motivasi dan pemahaman mengenai Desa Wisata sehingga tidak semua potensi wisata di Desa Pujon Kidul dapat dikembangkan secara maksimal. Adanya kendala tersebut mendorong Pemerintah Desa melakukan evaluasi dengan mengadakan penyuluhan serta sosialisasi mengenai Desa Wisata. Hasil lainnya yaitu; dengan adanya Desa Wisata Pujon Kidul cukup memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, seperti adanya penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan, serta berkurangnya jumlah anak putus sekolah.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Village Governance*), Desa Wisata, Kualitas Hidup.

ABSTRACT

Nikmah, Bachelor Degree, Department of Political Science, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Tourism Village Governance, Case Study in Pujon Kidul Village, Malang Regency. Supervisor: Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D, and Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA

This study identifies how the governance of the Tourism Village in Pujon Kidul Village is related to the management of abundant tourism potential owned by Pujon Kidul Village, both from the fields of agriculture, animal husbandry, nature, and art/culture that are packed into Tourism Villages that aim to achieve prosperity for the Village and the community by linking village tourism governance with its impact on the quality of life of the community. In conducting this research, researchers used a qualitative research approach where data collection using primary data through interviews and secondary data obtained from documents and websites analyzed using pattern matching and explanation techniques. This study uses a case study research method with an explanatory strategy because in this study more information is needed with the "how" question.

Village Governance in this study covers 3 aspects that are needed in the management of Tourism Villages, namely the mechanism of decision making, decision making, and evaluation of decisions, as well as covering the impact on the quality of life of the Village community.

The results of the analysis in this study the authors found that the governance of Tourism Village in Pujon Kidul Village runs well due to the leadership of the Village Head by running the Tourism Village Government based on the decision-making mechanism carried out by village meetings, mapping activities, and tahlil kubro activities and there are obstacles in the implementation lack of community participation due to lack of motivation and understanding of Tourism Village so that not all tourism potential in Pujon Kidul Village can be fully developed. The existence of these constraints has encouraged the Village Government to conduct an evaluation by conducting counseling and socialization of the Tourism Village. Other results are; with the existence of the Pujon Kidul Tourism Village, it has had an impact on the welfare and quality of life of the village community, such as the absorption of labor, increased income, and a reduction in the number of drop-outs.

Keywords: Village Governance, Village Tourism, Quality of Life.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Konseptual	11
2.1.1 Village Governance.....	11
2.2 Definisi Konseptual.....	18
2.2.1 Desa Wisata	18
2.2.2 Dampak Desa Wisata Terhadap Sosial Ekonomi	19
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Kerangka Berpikir	26
BAB III: METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian.....	29

3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Lokasi Penelitian	31
3.5 Sumber Data	31
3.6 Teknik Penentuan Informan	32
3.7 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7.1 Wawancara	34
3.7.2 Observasi	37
3.7.3 Dokumentasi	38
3.8 Teknik Analisis Data	39
3.8.1 Penjodohan Pola	39
3.8.2 Pembuatan Eksplanasi	40
BAB IV: PROFIL DESA PUJON KIDUL	42
4.1 Gambaran Umum Desa Pujon Kidul	42
4.1.1 Kondisi Geografis	43
4.1.2 Gambaran Umum Demografis	44
4.1.2.(a) Luas	44
4.1.2.(b) Perangkat Desa	45
4.1.2.(c) Lembaga Desa	46
4.1.2.(d) Data Penduduk	47
4.1.2.(e) Orbitasi Wilayah	47
4.1.2.(f) Sarana Prasarana	48
4.1.3 Kondisi Ekonomi	50
4.1.4 Kependudukan	52
4.1.5 Aspek Sumber Daya Alam	54
4.1.6 Aspek Sumber Daya Manusia	55
4.1.7 Wilayah Desa	55
4.1.8 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul	56
4.2 Visi dan Misi Desa Pujon Kidul	57
BAB V: MEKANISME PADA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERKAIT PENGELOLAAN DESA WISATA PUJON KIDUL BESERTA DAMPAKNYA	59
5.1 Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul	59
5.1.1 Pengambilan Keputusan Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul	66
5.1.1.(a) Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa	66
5.1.1.(b) Pengambilan Keputusan Pada Pengelolaan Desa Wisata	68
5.1.1.(c) Pengambilan Keputusan Melalui Tahlil Kubro	70
5.1.1.(d) Pengambilan Keputusan Melalui Kegiatan Pemetaan/Mapping	71

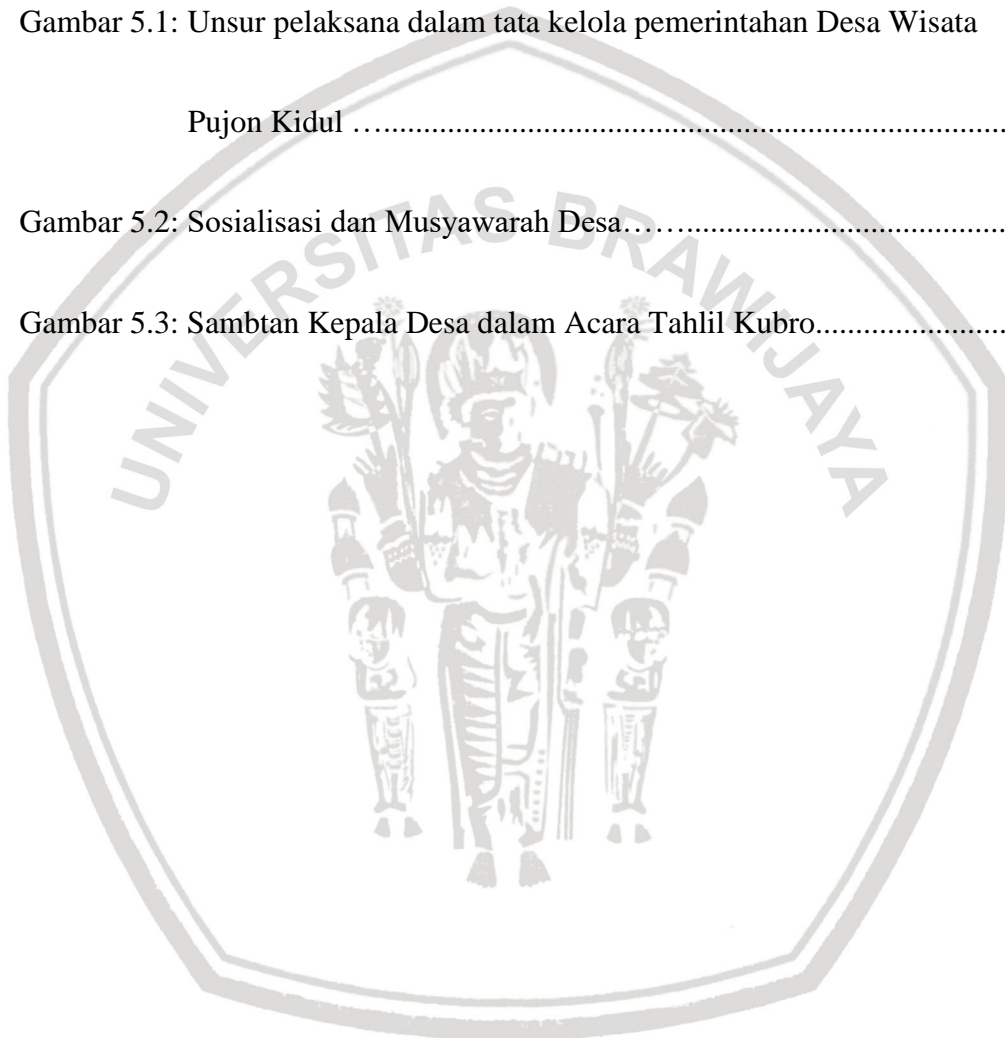
5.1.2 Pelaksanaan Keputusan Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul.....	74
5.1.2.(a) Objek Wisata Café Sawah.....	80
5.1.2.(b) Kendala Pelaksanaan Pada Mengembangkan Objek Wisata di Desa Wisata Pujon Kidul	81
5.1.3 Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul.....	84
5.2 Dampak Pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Desa	88
5.2.1 Kualitas Ekonomi.....	89
5.2.1.(a) Peningkatan Pendapatan.....	89
5.2.1.(b) Penyerapan Tenaga Kerja	91
5.2.2 Kualitas Kesehatan.....	92
5.2.3 Kualitas Pendidikan	96
5.2.3.(a) Strata Pendidikan	96
5.2.3.(b) Sarana Prasana Pendidikan	98
BAB VI: KESIMPULAN.....	100
6.1 Kesimpulan	100
6.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1: Penelitian Terdahulu.....	23
TABEL 3.1: Daftar Pertanyaan.....	36
TABEL 4.1: Masa Kepemimpinan Kepala Desa.....	42
TABEL 4.2: Jumlah Sarana Pendidikan Formal Non Formal.....	48
TABEL 4.3: Jumlah Organisasi Masyarakat.....	49
TABEL 4.4: Daftar SDA Desa Pujon Kidul.....	55
TABEL 4.5: Daftar SDM Desa Pujon Kidul.....	55
TABEL 4.6: Data Wilayah Administrasi Desa Pujon Kidul.....	56
TABEL 5.1: APBDes terkait pengelolaan Desa Wisata Tahun 2017.....	88
TABEL 5.2: Jumlah Tenaga Kesehatan.....	93
TABEL 5.3: Pendapatan Desa Pujon Kidul Tahun 2016.....	94
TABEL 5.4: Belanja Desa Pujon Kidul.....	94
TABEL 5.5: Tingkat Pendidikan Masyarakat Pujon Kidul.....	96
TABEL 5.6: Sarana Pendidikan Desa Tahun 2013-2018.....	98
TABEL 5.7: Anak Putus Sekolah di Desa Pujon Kidul.....	98
TABEL 5.8: Daftar Penggunaan APBD Bidang Pendidikan.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Distribusi Jumlah Perumahan.....	49
Gambar 4.2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	53
Gambar 4.3: Penduduk Desa Pujon Kidul Berdasarkan Usia.....	54
Gambar 5.1: Unsur pelaksana dalam tata kelola pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul	75
Gambar 5.2: Sosialisasi dan Musyawarah Desa.....	84
Gambar 5.3: Sambutan Kepala Desa dalam Acara Tahlil Kubro.....	85



DAFTAR BAGAN

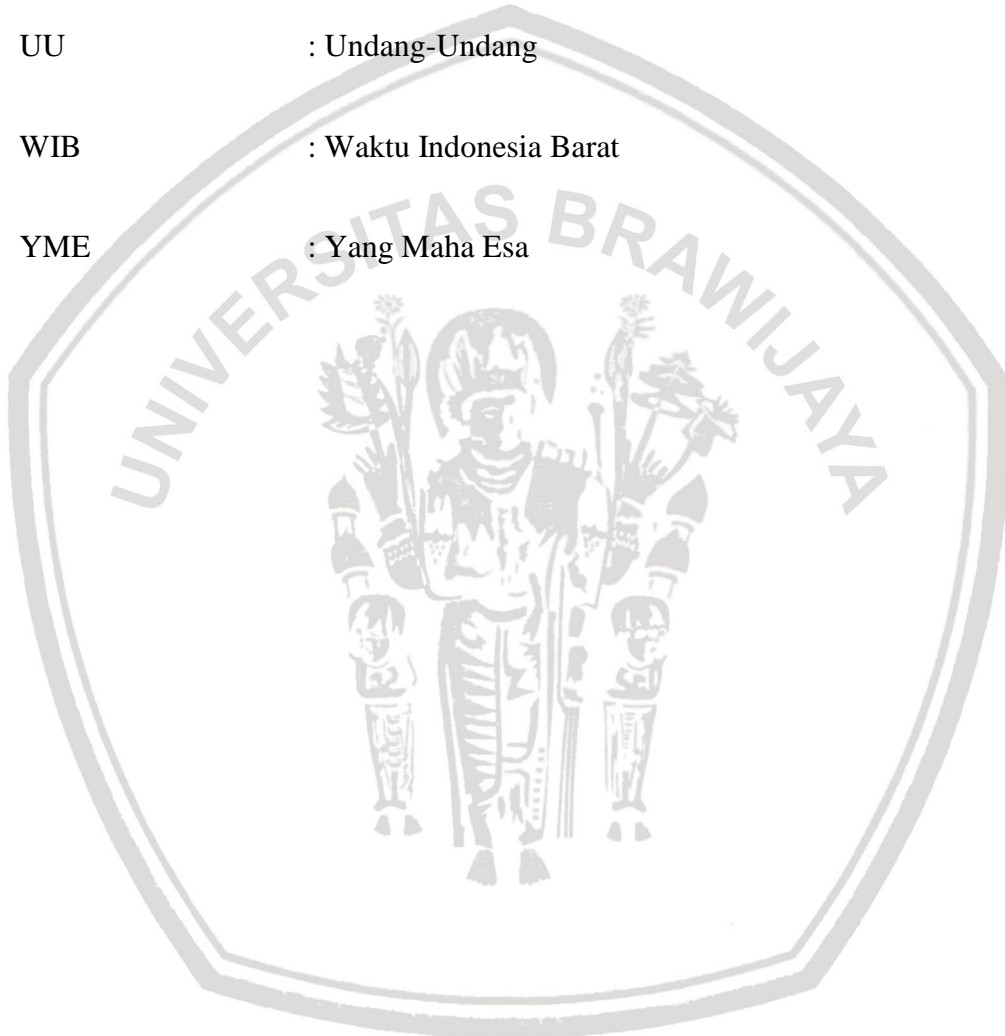
Bagan 2.1: Kerangka Berpikir.....	26
Bagan 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pujon Kidul.....	57
Bagan 5.1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul Tahun 2012 sebelum diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa	60
Bagan 5.2: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul Tahun 2012 sesudah diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa	61
Bagan 5.3: Mekanisme pengambilan keputusan dalam tata kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul.....	66
Bagan 5.4: Pengambilan Keputusan di Desa Pujon Kidul.....	72
Bagan 5.5: Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa Pujon Kidul.....	76

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
Ex	: Example
GAKI	: Gizi Akibat Kekurangan Iodium
Ha	: Hektar
Hal	: Halaman
KB	: Keluarga Berencana
KK	: Kartu Keluarga
KMS	: Kartu Menuju Sehat
KVA	: Kekurangan Vitamin A
LLA	: Lingkar Lengan Atas
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
No	: Nomor

Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbangdes	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
PERMENDES	: Peraturan kementerian Desa
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLD	: Pendamping Lokal Desa
PMT	: Program Makanan Tambahan
PNPM-P	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri
POKDARWIS	: Kelompok Sadar Wisata
Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PP	: Peraturan Pemerintah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar

SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TK	: Taman Kanak-kanak
TPQ	: Taman Pendidikan Qur'an
UU	: Undang-Undang
WIB	: Waktu Indonesia Barat
YME	: Yang Maha Esa



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.¹

Diaturinya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemampuan politik Pemerintah untuk menjadikan Desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Undang-Undang tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.²

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu Bangsa.³ Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas

¹Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah (2015), *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*, Fokusmedia: Bandung, hal.1.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

mewujudkan tujuan Nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di Daerah Perkotaan yang sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di Daerah Perkotaan yang lebih banyak, pada kenyataannya terjadi ketimpangan Kota dengan Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik masyarakat miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2016 dalam presentase mencapai yakni di perkotaan 7,79% dan di pedesaan 14,11%.⁴

Dalam tingkat Pemerintahan Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.⁵ Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, maupun Kemasyarakatan dan tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.⁶

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri,

⁴ www.bps.go.id. (diakses pada Sabtu 21 Oktober 2017, pukul 10:01 WIB)

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014

⁶ Hariadi, Pramono, et.al (2010), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat: Jakarta, hal.2.

maju, sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dijalankan pemerintah diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas untuk mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.⁷

Pembangunan desa dapat dilakukan melalui pengembangan pariwisata berupa program Desa wisata sebagai usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat yang berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Program Desa wisata yang dibentuk Pemerintah secara langsung diharapkan mampu melibatkan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengelola kampung halamannya sesuai dengan keotentikan desa. Adanya kepedulian bersama antara Pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam mengembangkan Desa wisata dan mampu merangsang perekonomian Desa serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pujon Kidul. Adanya kepedulian Pemerintah terhadap program desa wisata diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beberapa potensi dan karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih

⁷ <http://journal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Pembangunan/article/view/48>.(diakses pada Jumat 24 november 2017, pukul 09.11 WIB)

asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumber daya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Potensi daya tarik wisata baik yang bernuansa alam maupun budaya pada umumnya berada di pedesaan, seiring dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan. Oleh karena itu, berbagai potensi daya tarik wisata dikembangkan agar masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya terkait potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan Desa wisata.

Mengingat wisatawan dalam perjalanan wisatanya membutuhkan berbagai kebutuhan baik barang maupun jasa. Masyarakat di pedesaan yang telah merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan ke daerahnya, tentu akan berusaha menjaga lingkungan untuk tetap lestari bahkan meningkatkan kualitasnya. Karena apabila lingkungan alam dan budayanya rusak, tentu wilayahnya tidak akan lagi diminati oleh wisatawan. Hal ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Dengan demikian, maka melalui pengembangan desa wisata, lingkungan alam dan budaya setempat akan terjaga kelestarian dan kualitasnya, karena masyarakat akan berusaha menjaga dan memelihara lingkungannya untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya.⁸

Salah satu pengembangan desa wisata saat ini sudah mulai diterapkan di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Malang, salah satunya di Desa Pujon Kidul. Kegiatan perekonomian Desa Pujon Kidul selama ini masih di dominasi oleh sektor pertanian dan peternakan yang merupakan mata pencaharian masyarakat

⁸ Soekarya, Titien, (2011), *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa wisata*. Tersedia di (<http://www.kemenpar.go.id/asp/detail.asp?c=100&id=2982>) (diakses Jumat 24 november 2017, pukul 09.21 WIB)

setempat Desa Pujon Kidul. Hingga pada akhirnya Desa Pujon Kidul ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan mendapat penghargaan pada kategori Desa Wisata Agro terbaik di Jawa Timur sejak Mei 2017 yang disampaikan langsung oleh Menteri Kemendesa PDTT Eko Putro S kepada Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara.

Munculnya Desa Wisata Pujon Kidul karena adanya kesadaran dan kepekaan dari pemerintah desa dan kelompok pemuda Desa terhadap melimpahnya potensi yang dimiliki oleh Desa Pujon Kidul, dimana Desa Pujon Kidul memiliki potensi baik dalam bidang pertanian, peternakan, alam, dan seni/budaya yang dapat dikelola menjadi objek wisata yang menjanjikan.

Pada bidang pertanian, hampir seluruh wilayah pertaniannya dipergunakan untuk padi (8,5 ton/Ha), selebihnya dipergunakan untuk palawija; sayur : tomat, labu siam, kubis, sawi, wortel; dan buah-buahan : Apel , jambu biji, stroberi, alpukat. Kemudian dalam bidang peternakan, Desa Pujon Kidul memiliki peternakan sapi perah sebanyak 718 ekor yang menghasilkan susu sapi sekitar 6500 liter perhari. Selain peternakan sapi dan kambing, penduduk Desa Pujon juga ada yang memiliki peternakan ayam baik ayam kampung maupun ayam ras dengan hasil peternakannya berupa telur ayam.⁹

Selain itu Desa Pujon Kidul memiliki potensi seni/budaya maupun potensi alam, diantaranya: wisata alam air terjun sumber pitu, agrowisata petik sayur dan buah, wisata outbound, kesenian sadukan, kesenian kuda lumping, sentra olahan susu, wisata edukasi ternak sapi, hamparan sawah yang melimpah, dan masih

⁹ <http://wisatapujonkidul.blogspot.com/p/profil-desa.html> (diakses pada Sabtu 21 Oktober 2017, pukul 10:01 WIB)

banyak lagi potensi alam yang dimiliki desa pujon kidul yang dapat di gali dan dimaksimalkan oleh pemerintah desa agar berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan Masyarakat di Desa Pujon Kidul.¹⁰

Melimpahnya potensi yang dimiliki Desa Pujon Kidul tersebut nyatanya tidak semua dapat dikelola dan dimaksimalkan dengan baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakatnya. Hanya beberapa potensi yang sejauh ini berkembang, yaitu wisata alam café sawah yang merupakan produk wisata unggulan Desa Pujon Kidul yang paling diminati oleh para wisatawan karena dalam pengembangannya banyak masyarakat yang berpartisipasi. Tidak seperti pada potensi lain yang dimiliki Desa Pujon Kidul yang pengelolaannya masih kurang maksimal karena kurangnya minat maupun partisipasi dari sebagian masyarakat Pujon Kidul untuk menjadikan potensi-potensi yang dimiliki Desa Pujon Kidul menjadi produk unggulan.

Masyarakat Desa Pujon Kidul masih mengalami hambatan dalam proses partisipasi aktif yang berasal dari kurangnya motivasi dan pengetahuan masyarakat tentang Konsep Desa Wisata. Kekurangan sumber daya manusia mengakibatkan banyak potensi di Desa Pujon Kidul yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah desa untuk dijadikan objek wisata dan produk unggulan desa wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat perkembangan pembangunan objek wisata yang seharusnya dapat dilakukan dengan memaksimalkan berbagai potensi yang melimpah yang ada di Desa Pujon Kidul,¹¹

¹⁰ <http://wisatapujonkidul.blogspot.com/p/profil-desa.html> (diakses pada Sabtu 21 Oktober 2017, pukul 10:01 WIB)

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

Mayoritas penduduk desa merupakan kelompok tatanan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari keadaan alam di wilayahnya.

Dalam hal ini di perlukan tata kelola pemerintahan desa wisata yang meliputi mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal tersebut sangat jelas mengandung unsur dan memiliki keterkaitan dengan politik, diambil dari definisi politik menurut Peter Merkl bahwa politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan dan secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.¹²

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang di lakukan penulis maka keterkaitannya dengan politik adalah usaha Pemerintah Desa pada tata kelola Pemerintahan Desa wisata dalam menjalankan Pemerintahan sehingga menghasilkan proses politik yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi karena adanya tuntutan dari masyarakat desa dan pemerintah desa Pujon Kidul itu sendiri untuk menjadikan Desa Pujon Kidul sebagai Desa Wisata agar dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya bahwa proses politik merupakan pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah

¹² Budiardjo Miriam, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia, hal.15.

menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.¹³

Namun tidak hanya memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan terorganisir dengan baik mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar dapat meningkatkan pariwisata melalui pengembangan desa wisata sebagai upaya pengelolaan kekayaan alam dengan menggali dan memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki Desa Wisata Pujon Kidul, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan partisipasi masyarakat agar Desa Wisata Pujon Kidul dapat mempertahankan eksistensinya sebagai Desa Wisata Agro terbaik dan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat Desa dari segi perekonomian, kesehatan, dan juga pendidikan yang dihasilkan dari adanya Desa Wisata Pujon Kidul.

Dari pemaparan diatas, peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Desa Wisata Pujon Kidul, dan bagaimana dampak village governance di Desa Wisata Pujon Kidul terhadap kualitas hidup masyarakat Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

- a. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi keputusan pada tata kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul ?
- b. Bagaimana dampak dari bekerjanya tata kelola pemerintahan desa di Desa Wisata Pujon Kidul terhadap kualitas hidup masyarakat desa ?

¹³ *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi keputusan dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Desa Wisata Pujon Kidul.
- b. Untuk mengetahui dampak dari bekerjanya tata kelola Pemerintahan Desa di Desa Wisata Pujon Kidul terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia pendidikan dan bisa menjadi contoh pada penelitian selanjutnya.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa khususnya Pemerintahan Desa pada Desa Wisata Pujon Kidul.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Brawijaya

Dapat menambah koleksi bacaan sehingga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang study ilmu politik yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang masalah-masalah sosial maupun politik yang terjadi di masyarakat terutama mengenai tata kelola pemerintahan desa wisata dalam pengembangan desa wisata.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dan mendorong masyarakat untuk dapat menghadapi masalah-masalah sosial yang dihadapi serta mencari solusinya.

d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dengan penelitian ini maka penulis dapat menambah ilmu pengetahuan secara nyata di lapangan dan juga penulis menerapkan konsep yang pernah diajarkan selama perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian perlu adanya konsep yang digunakan, untuk memperkuat argumentasi dalam suatu pembahasan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang dirasa relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2.1.1 Village Governance

Village governance diartikan sebagai tata kelola Pemerintahan Desa. Pemerintahan diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi Pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa.¹⁴

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁵

Sedangkan tata kelola Pemerintahan merupakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang terorganisir dengan baik juga salah satu faktor keberhasilan suatu pemerintahan.¹⁶

¹⁴Himawan S Pambudi, dkk (2001), *Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Laper Pustaka Utama: Yogyakarta

¹⁵Maria Eni Surasih, (2006), *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga: Jakarta, hal. 23.

¹⁶Saripin, (1986), *Tata Pemerintahan dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa village governance atau tata kelola Pemerintahan Desa merupakan manajemen pembangunan sejalan dengan prinsip demokrasi yang melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014¹⁷ tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.¹⁸

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa terdiri atas:¹⁹

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa; yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketuai oleh sekretaris desa.
 - b. Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Seperti yang dikemukakan oleh Franz dan Keebet von Benda-Beckmann dalam penelitiannya yang membahas mengenai desentralisasi dan tata kelola

¹⁷Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 tentang desa

¹⁸Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3

¹⁹Nurcholis Hanif, (2011). *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Gelora Aksara Pratama: Jakarta, hal.75.

pemerintahan desa di Indonesia. Mereka menemukan temuan utama berupa transformasi Politik dan hukum adat dalam tata kelola Pemerintahan. Selain itu mereka mengemukakan bahwa tata kelola Pemerintahan Desa di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Desa tahun 2014, dimana Undang-undang tersebut secara eksplisit menyajikan opsi untuk kembali ke struktur adat dan memberikan desa lebih banyak hak maupun wewenang dalam menjalankan Pemerintahan.²⁰

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.²² Adapun tugas pokok Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

²⁰The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, J.A.C. Vela,b* and A.W. Bednerb, *Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law* 2015 Vol. 47, No. 3, 493507, <http://dx.doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>, (diakses pada Sabtu 20 november 2017, pukul 11:01 WIB)

²¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 tentang tata kelola pemerintahan desa

²²Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan Pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.²³

Selain Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan penyelenggara pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁴ Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Qingshan Tan dalam tulisannya yang berjudul “*why village election has not much improved village governance*” mengenai pemilihan Desa dalam Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa pemilihan Desa secara luas dipandang tidak banyak berpengaruh pada Pemerintahan Desa.

Dalam tulisan tersebut Qingshan Tan memeriksa beberapa faktor yang menyebabkan tata kelola desa yang tidak efektif, yaitu : defisiensi kelembagaan, pemerintah kota, Orientasi Negara dan Kebijakan Pembangunan Makro. Studi ini berpendapat bahwa meskipun ada perubahan baru yang terjadi di pedesaan, tata kelola desa masih merupakan bagian penting bagi stabilitas politik dan sosial di

²³Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.62.

²⁴Ketentuan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

pedesaan, oleh karena itu Qingshan Tan mengusulkan model pemerintahan baru dalam pemerintahan desa untuk menghasilkan pemerintahan desa yang efektif di pedesaan.

Pemerintah Desa tidak seperti pemerintah kota, desa lebih otonom dan pemerintahan mandiri, yang berarti bahwa penduduk Desa seharusnya mengelola kehidupan mereka sendiri dengan memilih pejabat Desa untuk mengurus urusan Desa. Pejabat Desa harus mampu menjalankan kekuasaan Pemerintahan mereka agar tata kelola Pemerintahan Desa berjalan baik dan efektif. Pemerintahan Desa disini mengacu pada pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi desa yang untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dan memajukan desa dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat yang berkelanjutan dan membawa perubahan positif dalam kehidupan desa.²⁵

Pengambilan keputusan diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan khususnya pada tata kelola Pemerintahan Desa. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.²⁶ Kebijakan Pemerintah Desa sama halnya dengan kebijakan publik pada umumnya baik itu kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kabupaten, sama-sama dibuat sebagai pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan, yang membedakannya hanya pada skala atau wilayahnya.

Sedangkan dalam praktek pengambilan keputusan, dalam hal ini kebijakan pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Setiap

²⁵Qingshan Tan, Why Village Election Has Not Much Improved Village Governance. Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Studies 2010, hal.153-154, (diakses pada Selasa 21 November 2017, pukul 10:22 WIB)

²⁶“Kebijakan”, <https://id.wikipedia.org>. (Di Akses 02 Desember 2017, pukul 21.28 WIB)

keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam proses pengesahan, sebab pengambilan keputusan masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan.

Desa pujon kidul merupakan Desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani karena desa pujon kidul memiliki kekayaan alam dan lahan pertanian yang melimpah dan cukup luas. Secara teoritis, lahan desa dimiliki secara kolektif oleh seluruh desa dan hanya komite desa, dengan berkonsultasi dengan penduduk Desa, dapat mengambil keputusan atas tanah Desa. Pada kenyataannya, Pemerintah Kota dan Daerah membuat keputusan untuk penduduk Desa mengenai komersialisasi lahan Desa, sehingga merampas Desa-desa sebagai sumber vital untuk Pemerintahan Desa.²⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah pusat telah memberikan prioritas pembangunan untuk menyelesaikan masalah. Namun, kebijakan yang berorientasi ekonomi ini menghasilkan hasil yang beragam untuk Pemerintahan Desa sendiri.

Kebijakan pembangunan pedesaan telah mengurangi beban ekonomi penduduk Desa melalui penghapusan pajak, pengurangan biaya, dan subsidi pertanian, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga Desa.

Pada saat yang sama, kebijakan pembangunan pedesaan memberi banyak penekanan pada pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan, listrik, fasilitas umum, dan lain-lain. Investasi semacam itu secara langsung memperhatikan kepentingan penduduk desa dan pemerintah desa.

²⁷ According to a survey by Rural Development Institute of Chinese Academy of Social Sciences, township-village land disputes have become a focal point of villagers' protest replacing disputes over fees as the number one issue. See, Yu Zhengrong [65].

Pada Desa Pujon Kidul pengambilan keputusan diperlukan dalam tata kelola Pemerintahan Desa untuk menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Desa melalui pemanfaatan lahan pertanian dan kekayaan alam yang dimiliki Desa Pujon Kidul agar dapat di kembangkan sebagai infrastruktur pedesaan seperti pengadaan tempat wisata sebagai fasilitas umum yang dapat meningkatkan pendapatan Desa dan warga Desa itu sendiri.

Sejauh ini Desa Pujon Kidul telah ditetapkan sebagai Desa Wisata agro terbaik, namun masih diperlukan pengambilan keputusan dalam tata kelola pemerintahan desa wisata pujon kidul untuk mengembangkan potensi desa pujon kidul yang belum dimaksimalkan sehingga dapat menjaga maupun mempertahankan eksistensi Desa Pujon Kidul sebagai Desa Wisata agro terbaik agar dapat terus meningkatkan pendapatan bagi Desa dan warga Desa itu sendiri.

Setelah pengambilan keputusan selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan atau implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi, setelah di ambil keputusan dan melaksanakan kebijakan maka di perlukan adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna di pertanggung jawabkan

kepada konstituennya, dan sejauh mana tujuan yang tercapai, serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Kebijakan tata kelola pemerintahan Desa dapat membangun pedesaan, dimana sekarang pertanian menjadi menguntungkan. Hal ini juga membuka peluang bagi penduduk desa untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada Pemerintahan Desa, dalam upaya pembangunan desa melalui bidang pariwisata. Setiap pembangunan Desa memerlukan partisipasi dari masyarakat misalnya dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis serta dalam pelaksanaannya juga di butuhkan partisipasi masyarakat sehingga dapat berdampak pada pendapatann Desa dan masyarakat Desa itu sendiri.

2.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual di sini adalah guna membatasi berbagai konsep yang digunakan sebagai operasional untuk mempermudah memahami studi penelitian. konsep yang digunakan diantaranya: desa wisata, dan dampak.

2.2.1 Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu kawasan atau wilayah yang didalamnya terdapat banyak atraksi wisata (budaya, buatan, alam) yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik wisatawan berkunjung. Hadiwijoyo menjelaskan bahwa syarat sebuah desa wisata yaitu aksesibilitas baik, terdapat obyek-obyek menarik, masyarakat dan aparat menerima dan mendukung, keamanan, tersedia fasilitas

desa wisata (akomodasi, telekomunikasi, tenaga kerja), beriklim sejuk, dan berhubungan dengan obyek lain yang sudah dikenal masyarakat luas.²⁹

Tyas Pratiwi³⁰ dalam studinya menyebutkan bahwa komponen utama yang harus ada dalam desa wisata adalah:

- a. Akomodasi: Sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi: Seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: Kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Widi Kurniawan³¹ dalam studinya menyebutkan bahwa konsep pengembangan desa wisata dapat dilihat dari definisinya, yaitu merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata berupa kehidupan desa yang memiliki ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam, hasil budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan.

2.2.2 Dampak Desa Wisata Terhadap Sosial Ekonomi

Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.³² Sedangkan dampak menurut Kamus Besar

²⁹Hadiwijoyo, Suryo Sakti, (2012), *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

³⁰Tyas Pratiwi, (2008), *Potensi Karanggeneng sebagai Desa Wisata di Sleman*, Tugas Akhir Program Diploma III Bahasa Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

³¹Widi Kurniawan, (2005), *Sentra Pengembangan Desa Wisata di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman*.Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

³²Dicktus (2013) "Definisi, Dampak, Pengendalian Hujan Asam Niken", Diakses Dari <http://www.scribd.com/search?query=definisi+dampak>, Diakses pada 12 oktober 2018

Bahasa Indonesia (2016) merupakan pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat (baik positif atau negatif).³³

Secara ekonomi, dampak memiliki makna yakni pengaruh suatu pelaksanaan terhadap kondisi perekonomian di suatu Negara. Dampak merupakan perubahan yang terjadi dilingkungan karena adanya aktifitas manusia.³⁴ Dampak dalam suatu proyek pembangunan wisata utamanya pada aspek sosial ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1) Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Dampak yang di timbulkan langsung dari adanya pariwisata di suatu daerah dapat dilihat dari pemasukan yang diperoleh melalui pajak atau retribusi dari fasilitas yang telah di sediakan berupa penyediaan jasa.³⁵

2) Peningkatan income masyarakat

2) kesehatan masyarakat

3) Penyerapan tenaga kerja

4) Pendidikan Masyarakat

5) Perkembangan struktur ekonomi yang ditandai adanya aktifitas perekonomian akibat proyek yang dilakukan seperti warung, restoran, transportasi, toko dan lain sebagainya.

Perubahan yang terjadi pada manusia maupun masyarakat yang diakibatkan karena adanya aktifitas pembangunan disebut sebagai dampak sosial.³⁶ Adapun

³³KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/dengan> [Diakses 12 oktober 2018].

³⁴Suratmo Gunarwan, (2004), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal.24.

³⁵Astuti Dewi, (2010), *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia.

³⁶Sudharto P. Hadi, (1995), *Aspek Sosial Amdal*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

dampak sosial yang muncul disebabkan oleh adanya aktifitas seperti: program, proyek ataupun kebijaksanaan yang diterapkan pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh pada keseimbangan sistem masyarakat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini akan di jelaskan mengenai studi-studi relevan yang pernah di lakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai tata kelola Pemerintahan pada tingkatan desa sebagai berikut:

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Dwi Ambarwati dengan judul skripsi Tata kelola penyelenggara pemerintahan desa menurut PP No.72 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten)³⁷. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola penyelenggara pemerintahan desa Tarubasan menurut PP No 72 tahun 2005. desa Tarubasan berpedoman dengan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam tata kelola penyelenggara pemerintahan juga banyak mendapati kendala, salah satunya adalah kendala dalam membuat Rancangan APBDes di bidang pembangunan, bantuan sosial dari pemerintah dan dalam bidang pertanian tentang irigasi. Namun dengan kerja keras pemerintahan desa Tarubasan dapat mengatasi kendala tersebut sehingga dapat dicapai dengan baik.

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Okta Rosalinda LPD (2014) dengan judul skripsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep,

³⁷ Afuwat Ayu Wibowo, *pengembangan desa wisata sebagai model pemberdayaan masyarakat di desa brayut kabupaten Sleman, provinsi DIY*, jurnal nasional pariwisata. Vol.4 No.1.2012

Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang).³⁸ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu : Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Ketiga, penelitian tentang Pengembangan Program Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi, yang diteliti berdasarkan kerja tim terdiri dari tiga orang peneliti yaitu Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum, drh. Arya Mahdi, dan Tri Mulyati, M.Pd.³⁹ Penelitian ini mengkaji aktifitas pengelolaan Kemiren sebagai desa wisata dan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat, kemudian memetakan faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat, dan mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata, serta merancang model atau strategi pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat.

³⁸Sutiyono, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*

³⁹Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum, drh. Arya Mahdi, dan Tri Mulyati, M.Pd, *Pengembangan Program Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi*

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Yuliana Dwi Ambarwati	<i>Tata kelola penyelenggara pemerintahan desa menurut PP.No.72 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Tarubasan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola penyelenggara pemerintahan desa Tarubasan menurut PP No 72 tahun 2005. desa Tarubasan berpedoman dengan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.	Kedua penelitian membahas mengenai tata kelola pemerintahan desa.
2.	Okta Rosalinda LPD (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)	Termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu : Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah.	Kedua penelitian ini membahas mengenai pengelolaan di tingkat desa
3	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum, drh. Arya	<i>Pengembangan Program Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis</i>	Penelitian ini membahas aktifitas pengelolaan Kemiren sebagai	Kedua penelitian ini membahas mengenai pengelolaan desa wisata.

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Mahdi, dan Tri Mulyati, M.Pd.	<i>Partisipasi Masyarakat di Desa Keiren Kabupaten Banyuwangi</i>	desa wisata dan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat, memetakan faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat, dan mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata, serta merancang model atau strategi pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat. dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti pada 16 oktober 2017

Dari tiga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang di lakukan penulis. *Pertama*, dilihat dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data adalah di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Kedua, dilihat dari fokus permasalahan dalam penelitian yang dibahas oleh masing-masing penulis. Penulis membahas mengenai pembangunan Desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa Wisata di bidang pariwisata berdasarkan tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta dampak dari pengembangan desa wisata tersebut terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Berbeda dengan tiga penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas mengenai pengelolaan pemerintahan Desa yang terfokus pada PP No.72 Tahun 2005, mengenai pembangunan Desa melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta penelitian terakhir membahas mengenai aktifitas pengelolaan Kemiren sebagai desa wisata dan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat.

Ketiga, dilihat dari potensi pada masing-masing desa, desa-desa pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas tidak memiliki keunggulan potensi ataupun keunggulan yang melimpah di bidang pariwisata seperti pada desa pujon kidul. Desa pujon kidul potensi alam dan kesenian yang berlimpah seperti agrowisata petik sayur dan buah, tracking Gunung Kawi, wisata outbound, kesenian sadukan, kesenian kuda lumping, sentra olahan susu, dan wisata edukasi ternak sapi.

Desa pujon kidul didukung oleh kesenian tradisional yang masih terjaga dan letaknya yang jauh dari perkotaan serta dikelilingi gunung membuat pujon kidul

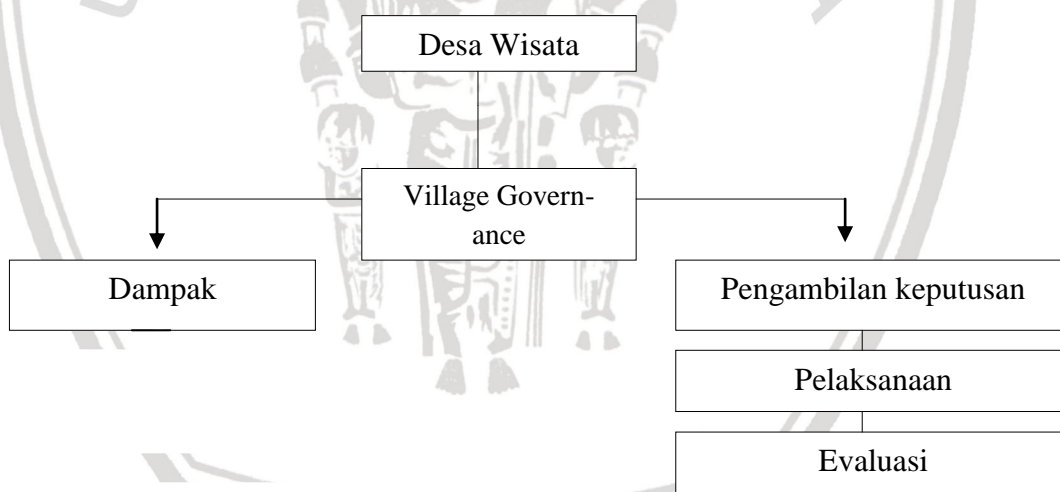
memiliki pemandangan yang indah dan udara yang sangat sejuk. Di Desa Pujon Kidul kelestarian lingkungan maupun kelestarian budayanya masih terjaga.

Ini yang menjadikan penelitian yang di lakukan oleh penulis berbeda dengan beberapa penelitian yang di lakukan sebelumnya. Pada 3 (tiga) penelitian sebelumnya tidak membahas secara spesifik mengenai tata kelola Pemerintahan Desa wisata (Village Governance) beserta dampaknya terhadap kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat Desa. Maka kekosongan ini yang akan di isi oleh penulis pada penelitian ini.

2.4 Kerangka Berpikir

Dari penjabaran diatas, adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis

Pada gambar di atas peneliti mencoba menjelaskan kerangka berpikir penelitian. Desa wisata merupakan suatu kawasan atau wilayah yang didalamnya terdapat banyak atraksi wisata (budaya, buatan, alam) yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik wisatawan berkunjung. Dalam pengembangan Desa Wisata

diperlukan pengelolaan untuk memanfaatkan dan menggali potensi sumber daya di Desa Pujon Kidul yang belum di maksimalkan.

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁰ Dalam pengelolaannya, Desa Wisata memerlukan tata kelola Pemerintahan Desa yang terorganisir dengan baik mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar berbagai potensi yang belum di maksimalkan dapat digali dan dikembangkan lagi menjadi produk keunggulan Daerah.

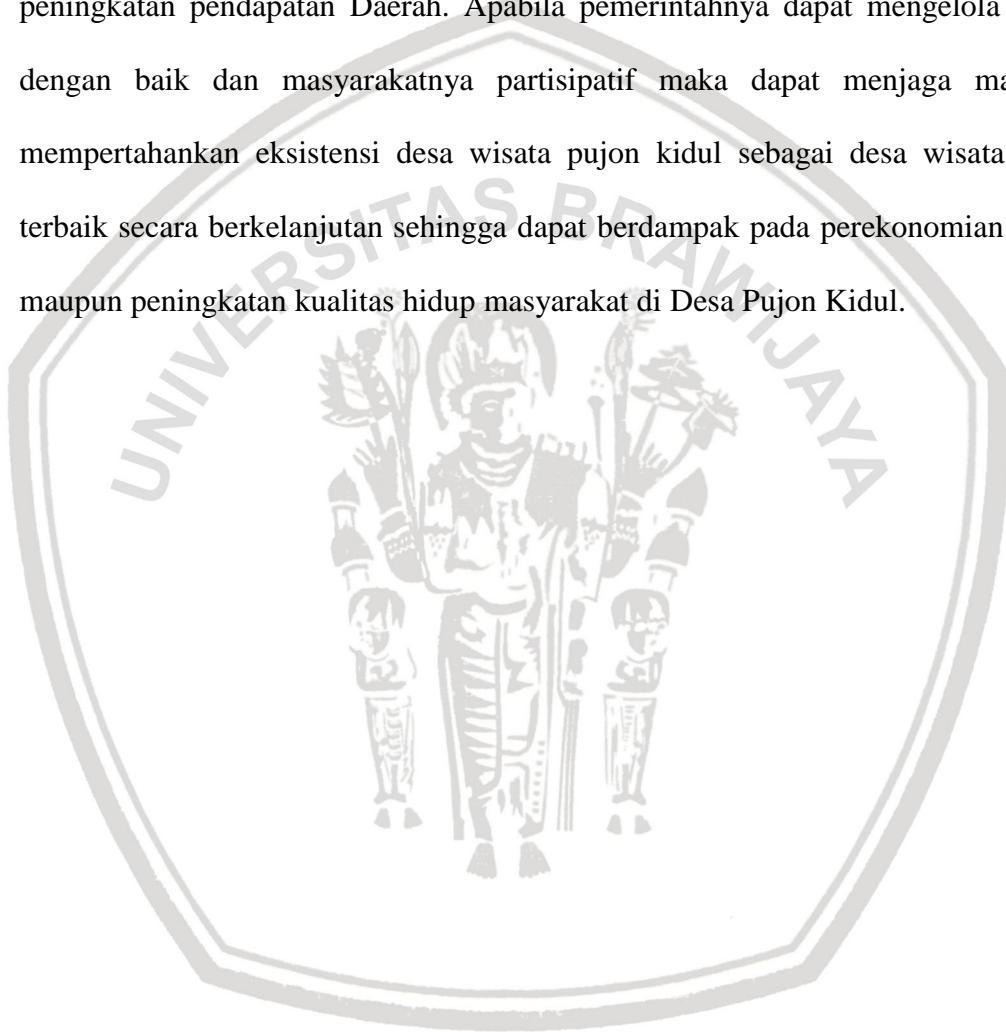
Kepedulian bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata dirasa akan mampu merangsang Pemerintah Desa untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola Pemerintahan Desa melalui pariwisata dengan mengelola potensi yang belum di maksimalkan.

Berbagai nilai, budaya, kondisi alam yang dimiliki Daerah dapat dimaksimalkan menjadi nilai tambah bagi Pemerintah dan bagi masyarakat. Karena dengan adanya desa wisata dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang lahannya digunakan sebagai objek wisata seperti lahan sawah milik warga yang menjadi bagian dari objek wisata pada wisata café sawah Pujon Kidul.

Dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang dilakukan dengan baik secara terorganisir meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi maka

⁴⁰ Daryanto, (1997), Kamus Indonesia Lengkap, Surabaya. Apollo, hal.348.

akan dapat mengolah berbagai sumber daya yang belum dimaksimalkan menjadi keunggulan dan produk unggulan Daerah sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan. perkembangan industri pariwisata yang dalam hal ini adalah Desa Wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah, antara lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan Daerah. Apabila pemerintahnya dapat mengelola Desa dengan baik dan masyarakatnya partisipatif maka dapat menjaga maupun mempertahankan eksistensi desa wisata pujan kidul sebagai desa wisata agro terbaik secara berkelanjutan sehingga dapat berdampak pada perekonomian Desa maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Pujan Kidul.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berasal dari antropologi dan sosiologi yang mulai berkembang di abad 19.⁴¹ Dimana riset kualitatif cenderung mempunyai banyak kualitas yang “personable” yang artinya dapat mengenal orang/kelompok orang yang kita teliti.⁴² Pendekatan kualitatif adalah istilah generik untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks.⁴³

Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan dapat menggali informasi yang lebih dalam di lapangan dan kualitas informasi juga dapat di analisis dengan baik, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tidak terhingga sehingga mampu mencapai informasi yang dibutuhkan dan bahkan mendapat temuan baru. Selain itu pendekatan kualitatif lebih mengandalkan pada tindakan dan pikiran responden, dapat melihat dan merasakan langsung apa yang dialami oleh responden dan dapat menguatkan informasi penelitian.⁴⁴

3.2 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. pemilihan metode studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan metode

⁴¹Lisa Harrison, (2007), “*Metodologi Penelitian Politik*”, Jakarta: Kencana, hal.86

⁴²Ibid, hal.91

⁴³David Marsh & Gerry Stoker, (2012), “*Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*”, Bandung: Nusa Media, hal.239

⁴⁴Lisa Harrison, Op.,cit, hal.92

studi kasus merupakan metode yang dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian yang lebih bersifat pertanyaan bagaimana dan kenapa sejalan dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang penulis bahas pada penelitian ini yang merupakan pertanyaan bagaimana.

Penelitian studi kasus dapat di bedakan menjadi tiga tipe strategi yaitu eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Dalam penggunaannya, penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini perlu memusatkan perhatian pada aspek pendesainan dan penyelenggaraannya agar lebih mampu menghadapi kritik-kritik tradisional tertentu.⁴⁵

Strategi yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode studi kasus dengan strategi eksplanatoris, yaitu strategi yang dalam penggunaannya menggali informasi berdasarkan pertanyaan bagaimana karena dalam penelitian ini lebih banyak informasi yang dibutuhkan dengan pertanyaan “bagaimana?”. Strategi eksplanatoris lebih mengarah ke penggunaan strategi-strategi studi kasus, historis, dan eksperimen. Hal ini di sebabkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkenaan dengan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri, dan bukan sekedar frekuensi atau kemunculan.⁴⁶

Adapun menurut Yin definisi yang lebih teknis yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata apabila batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.⁴⁷

⁴⁵Prof. Dr. Robert K.Yin (2014), “*Studi Kasus (desain & metode)*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.1

⁴⁶*Ibid.*, hal. 9

⁴⁷*Ibid.*, hal. 18

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi dan menentukan sasaran penelitian agar dapat mengklarifikasi data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai tata kelola pemerintahan terkait pengelolaan Desa Wisata di Desa Wisata Pujon Kidul berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti yaitu di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kidul Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi kelurahan/Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang karena Desa Pujon Kidul telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan mendapat penghargaan pada kategori desa wisata agro terbaik di Jawa Timur sejak Mei 2017 yang disampaikan langsung oleh Menteri Kemendesa PDTT Eko Putro S kepada Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara.

3.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subjek yang akan diteliti. Sumber data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa data dari hasil interview atau wawancara secara langsung dengan para informan yang

terkait ataupun yang memahami mengenai tata kelola Pemerintahan Desa Wisata dan dari hasil observasi langsung di tempat.

Penulis akan melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata yaitu Pemerintah Desa dalam hal tata kelola pemerintahannya terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat sebagai subjek yang terkena dampak ekonomi maupun sosial dari adanya pengembangan desa wisata.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada, berupa dokumen-dokumen, website dan lain-lain. Seperti misalnya media cetak berupa koran, media online berupa jurnal dan berita online. Kemudian berkas-berkas dari Pemerintah Desa Pujon Kidul.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling yaitu informan yang diseleksi dengan dasar kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu informan yang diwawancarai, artinya peneliti memilih narasumber yang benar-benar mengetahui mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan di desa pada pengembangan desa wisata pujon kidul seperti Pemerintah desa dan POKDARWIS. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Informan Kunci: Kepala Desa Pujon Kidul, Bapak Udi Hartoko sebagai instansi pemerintah daerah yang terkait dan berwenang dalam upaya tata kelola pemerintahan desa dalam pengembangan desa wisata pujon kidul, dan sebagai

instansi pemerintah di desa yang memiliki peran penting bagi peningkatan pariwisata daerahnya. Selain itu, Kepala Desa yaitu Bapak Udi Hartoko ditetapkan penulis sebagai informan kunci karena beliau sebagai subjek penting dalam pengembangan Desa Wisata, dimana Beliau sebagai penggagas atau inspirator serta fasilitator dalam pengembangan Desa Wisata.

- b. Informan Pendukung: Anggota POKDARWIS sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul, Ibadur Rohman selaku pengelola. Penulis memilih Bapak Ibadur Rohman sebagai informan pendukung karena peran Beliau dalam pengembangan Desa Wisata sebagai motivator dan penggerak sangat penting. Beliau menggerakkan POKDARWIS dan Beliau memahami pola kerja di lapangan, seperti Beliau telah berhasil mengembangkan objek Wisata café sawah.
- c. Informan Tambahan: Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dari pengembangan desa wisata seperti : Pedagang yang berjualan di objek wisata, Ibu Ertifa dan Ibu Payama. Juru parkir, Bapak Sutomo. Dan pelayan di objek wisata, Ibu Nurjannah. Pemilihan Masyarakat setempat sebagai informan tambahan ini dikarenakan masyarakat dalam hal ini sebagai subjek penting dalam pembahasan terkait kualitas hidup dan kesejahteraan, dimana masyarakat setempat dapat merasakan langsung dampak yang diperoleh dari adanya pengembangan Desa Wisata.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data untuk penelitian studi kasus berasal dari enam sumber, yaitu: dokumentasi, rekaman arsip,

wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik. Penggunaan keenam sumber ini memerlukan keterampilan dan prosedur metodologis yang berbeda-beda. Selain sumber-sumber diatas, ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam pengumpulan data studi kasus. Hal tersebut mencakup penggunaan: (1) berbagai sumber bukti yaitu bukti dari dua atau lebih sumber tetapi menyatu dengan serangkaian fakta atau temuan yang sama, (2) data dasar, yaitu kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus yang bersangkutan, dan (3) serangkaian bukti, yaitu keterkaitan yang eksplisit antara pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan, data yang terkumpul dan kesimpulan yang di tarik. Pengacuan terhadap prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kualitas substansi studi kasus yang bersangkutan.⁴⁸

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

3.7.1 Wawancara

Salah satu sumber informasi pada penelitian studi kasus yang sangat penting adalah wawancara, karena wawancara merupakan sumber informasi yang esensial bagi studi kasus. Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.⁴⁹

Selain *open-ended*, terdapat tipe wawancara yang kedua, yaitu wawancara yang terfokus, dimana responden di wawancarai dalam waktu yang pendek. Dalam kasus semacam ini, wawancara tersebut bisa tetap *open-ended* dan

⁴⁸Prof. Dr. Robert K.Yin, (2014), "*Studi Kasus (desain & metode)*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.101.

⁴⁹*Ibid*, hal.108.

mengasumsikan cara percakapan namun pewawancara tak perlu mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu yang diturunkan dari protocol studi kasusnya.⁵⁰

Kemudian tipe wawancara yang ketiga, yaitu wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang tersruktur, sejalan dengan survei. Tipe survei ini akan meliputi prosedur sampling maupun instrument seperti yang digunakan pada survei umumnya, dan selanjutnya akan di analisis dengan cara yang sama.

Secara keseluruhan, wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan yang harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang di wawancarai, dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam situasi yang berkaitan.⁵¹

Wawancara dipahami sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung bersama informan kunci, informan pendukung, dan informan tambahan yaitu pemerintah/perangkat desa, pengelola objek wisata, dan masyarakat desa pujon kidul yang terkena dampak langsung dari adanya pengembangan desa wisata guna memperoleh data yang valid berkaitan dengan tata kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul.

Adapun daftar pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁰*Ibid*, hal.109.

⁵¹*Ibid*, hal.110-111.

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan

No	Rumusan Masalah	Daftar Pertanyaan	Daftar Informan
1.	Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi keputusan dalam tata kelola pemerintahan desa wisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.	Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam tata kelola pemerintahan desa wisata?	Kepala desa, Udi Hartoko.
		Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan?	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa, Udi Hartoko • Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang terkena dampak langsung seperti: (para pedagang, juru parkir, petugas kebersihan, pelayan.
		Faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan?	Kepala desa, Udi Hartoko.
		Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa, Udi Hartoko • Masyarakat setempat yang mengerti mengenai desa wisata dan terkena dampak langsung.
		Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses pelaksanaan keputusan?	Kepala desa, Udi Hartoko.
		Sudah maksimalkah kinerja pemerintah desa?	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dan yang mengerti mengenai desa wisata pujon kidul. • Kepala Desa, Udi Hartoko.
		Adakah kritik dan saran dari masyarakat terkait keputusan yang di ambil dalam tata kelola pemerintah desa wisata pujon kidul?	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dan yang mengerti mengenai desa wisata pujon kidul. • Kepala desa, Udi

No	Rumusan Masalah	Daftar Pertanyaan	Daftar Informan
			Hartoko.
		Bagaimana keberlanjutan dari kritik dan saran tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dan yang mengerti mengenai desa wisata pujan kidul. • Kepala desa, Udi Hartoko.
2.	Dampak village governance terhadap kualitas hidup masyarakat desa?	Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa wisata?	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dan yang mengerti mengenai desa wisata pujan kidul. • Kepala Desa, Udi Hartoko.
		Adakah perubahan yang di rasakan masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dan yang mengerti mengenai desa wisata pujan kidul.
		Apakah terjadi peningkatan pendapatan/kualitas hidup?	Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dan yang mengerti mengenai desa wisata pujan kidul.

Sumber : Diolah oleh penulis

3.7.2 Observasi

Dengan membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti dapat melakukan observasi langsung. Dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan

akan bersedia untuk observasi. Observasi tersebut dapat terbentang mulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga yang kausal. Yang paling formal, protocol observasi dapat dikembangkan sebagai bagian dari protocol studi kasus, dan peneliti yang bersangkutan bisa diminta untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu dilapangan.⁵²

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Wisata Pujon Kidul dengan pengamatan terhadap kejadian, peristiwa, maupun tingkah laku informan secara cermat terkait bekerjanya tata kelola Pemerintahan Desa dan dampak dari bekerjanya tata kelola Pemerintahan Desa terhadap kualitas hidup masyarakat Desa dengan adanya pengembangan desa wisata. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kecamatan Pujon Kidul.

3.7.3 Dokumentasi

Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, dimana dokumen tersebut adalah data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait penelitian. Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar. Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Ketiga, inferensi

⁵²Prof. Dr. Robert K.Yin (2014), "*Studi Kasus (desain & metode)*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.112-113.

dapat di buat dari dokumen-dokumen.⁵³ Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai Tata kelola Pemerintahan Desa Wisata dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pada pengembangan Desa Wisata, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

3.8 Teknik Analisis Data

Bagian terpenting dalam proses penyusunan laporan penelitian adalah analisa data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Robert. K Yin yaitu penjodohan pola, dan pembuatan eksplanasi.⁵⁴

3.8.1 Penjodohan Pola

Pada penelitian studi kasus, salah satu strategi yang paling disenangi adalah penggunaan logika penjodohan pola. penjodohan pola didasarkan pada proposisi teoritis awal. Proposisi teoritis yaitu, proposisi yang nantinya digunakan untuk membentuk rencana pengumpulan data dan karenanya memberi prioritas pada strategi analisis yang relevan. Selain itu proposisi tersebut juga membantu memfokuskan perhatian pada data tertentu dan mengabaikan data yang lain, sehingga bisa menetapkan alternatif penjelasan yang harus diuji karena proposisi tersebut membantu pengorganisasian keseluruhan peneliti studi kasus berlangsung.⁵⁵

⁵³Prof. Dr. Robert K.Yin (2014), "*Studi Kasus (desain & metode)*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.103-104

⁵⁴*Ibid*, hal.140-146.

⁵⁵*Ibid*, hal.136-137.

Dalam studi penulis dengan metode studi kasus ini proposisi yang diajukan sebagai berikut; (a) tata kelola Pemerintahan (Village Governance) Desa Pujon Kidul; (b) pengembangan Desa wisata; (c) dampak desa wisata terhadap sosial ekonomi ataupun kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat.

3.8.2 Pembuatan Eksplanasi

Selanjutnya strategi analisis data menurut Yin, yaitu pembuatan eksplanasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada proses awal penelitian, penulis membuat pertanyaan atau proposisi awal terhadap kasus yang akan diteliti;
2. Mengadakan perbandingan antara temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan atau proposisi, dalam hal ini penulis membandingkan antara temuan awal yang didapat dari proses wawancara mendalam di lokasi penelitian. Sehingga disini dapat diketahui perbedaan temuan atau data yang didapat;
3. setelah membandingkan atau mengetahui persamaan serta perbedaannya yang didapat dalam penelitian di lapangan, maka langkah selanjutnya yaitu memperbaiki pernyataan awal yang telah dilakukan pada tahap awal. Perbaikan pernyataan atau proposisi dilakukan karena penulis telah mendapatkan perbandingan temuan awal dan pada saat pelaksanaan wawancara dengan informan;
4. Mengadakan perbandingan mengenai rincian kasus-kasus lainnya dalam rangka perbaikan, tujuan dari ini adalah untuk melihat bagaimana temuan yang telah didapatkan dari penelitian sebelumnya dengan data yang didapatkan dari proses analisis teoritis;

5. Setelah itu pernyataan dan proposisi diperbaiki lagi, dimulai dari tahap awal ketika proses membuat pernyataan teoritis, membandingkan dengan temuan awal, memperbaiki pernyataan dan melihat apakah data yang diperoleh di lapangan sudah menjawab rumusan masalah;



BAB IV

PROFIL DESA PUJON KIDUL

4.1 Gambaran Umum Desa Pujon Kidul

Desa Pujon Kidul merupakan salah satu dari sepuluh Desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pemerintah Pujon Kidul pada tahun 2017 yang lalu telah memasuki periode ke-6 (enam). Masa kepemimpinan Desa Pujon Kidul di mulai pada tahun 1901-sekarang dengan jumlah 12 kepala desa yang tergambar dalam tabel 4.1.⁵⁶

Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	Jaeng Retno	1901	1915
2	Jaeng Rono	1915	1925
3	Rateno	1925	1945
4	Saeru	1945	1978
5	Admadiharjo	1979	1980
6	Painu	1980	1983
7	Djuma'i	1983	1993
8	Sugiono	1993	1994
9	Siti Nurjana	1994	2000
10	Jamludin	2000	2001
11	Sugiono	2001	2011
12	Udi Hartoko	2011	2018

Sumber : Diolah oleh penulis melalui “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Pujon Kidul Tahun Anggaran 2017*”

Sejak Tahun 2014 Desa Pujon Kidul telah di resmikan sebagai Desa Wisata yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan mendapat penghargaan pada kategori desa wisata agro terbaik di jawa timur sejak mei 2017 yang di sampaikan langsung oleh Menteri Kemendesa PDTT Eko Putro S kepada Kepala Disparbud Kabupaten Malang,

⁵⁶Dari dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017*”, hal.6.

Made Arya Wedhantara. Hal tersebut karena Desa Pujon Kidul memiliki potensi Alam yang melimpah, terdapat pemandangan alam lahan sawah yang terhampar luas dan udara yang sejuk sehingga membuat Desa Pujon Kidul dapat di jadikan tempat kunjungan wisata yang diminati banyak wisatawan.

4.1.1 Kondisi Geografis⁵⁷

Keseharian masyarakat Desa Pujon Kidul adalah mayoritas petani dan peternak sapi perah. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian hortikultura dengan menggunakan cara yang sederhana serta konvensional dan hasil panen belum sepenuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini.

Secara geografis Desa Pujon Kidul terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 1200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Pujon Kidul rata-rata mencapai 2.000 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1200 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2010-2013.

Secara administratif, Desa Pujon Kidul terletak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan posisi di batasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa pujon lor Di sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukomulyo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa pujon lor. Kecamatan Pujon.

⁵⁷ Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam "*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*), hal. 2-3

Jarak tempuh Desa Pujon Kidul ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3,5 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 37 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 1.1/2 jam.

4.1.2 Gambaran Umum Demografis⁵⁸

Pada gambaran umum demografis akan dijabarkan terkait kependudukan dan wilayah Desa yang mencakup luas wilayah, perangkat Desa, Lembaga Desa, sarana prasarana, dan data penduduk sebagai berikut:

4.1.2.(a) Luas

Luas Wilayah Desa Pujon Kidul adalah 323.159 Ha. Luas lahan yang ada dikelompokkan menjadi beberapa bagian, seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk permukiman adalah 24.9 Ha. Luas lahan yang di peruntukkan untuk pertanian adalah 87 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 578 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk sekolah 0,4 Ha, olahraga 0,5 Ha, dan tempat pemakaman umum 0,5 Ha.

Wilayah Desa Wisata Pujon Kidul secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Pujon Kidul terpetakan sebagai berikut: sangat subur 56 Ha, subur 140 Ha, sedang 1.109 Ha, tidak subur/kritis 233 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan

⁵⁸Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*), hal. 3-4.

menghasilkan 8,5 ton/ha. Tanaman jenis palawijaya juga cocok di tanam di Desa Pujon Kidul.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawijaya seperti jagung serta tanaman buah seperti apel, tomat, wortel juga mampu menjadi sumber pemasukan/*income* yang cukup handal bagi penduduk Desa Pujon Kidul. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman kayu-kayuan merupakan tanaman andalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi menyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. jenis tanah hitam Desa Pujon Kidul ini menjadi bagus sebagai lahan Pertanian.

4.1.2.(b) Perangkat Desa⁵⁹

Desa Pujon Kidul di bagi menjadi 3 wilayah Dusun yang terdiri 9 RW dan di bagi menjadi 19 RT, berikut data Perangkat Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang:

Kepala Desa	: Udi Hartoko
Sekretaris Desa	: Sudirman
Kepala Desa Krajan	: Ahmat Imam
Kepala Desa Maron	: Suhartono
Kepala Desa Tulungrejo	: Kusnin
Kaur Pemerintahan	: Muhammad Ismail Mahfudz Said
Kaur Keuangan	: Asmawi
Kaur Pembangunan	: Nurahmad
Kaur Kesra	: -
Staff Kesra	: Ponan

⁵⁹ Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*”, hal. 13-14.

Kaur Umum

: Anas Taufiq,S.Pt

4.1.2.(c) Lembaga Desa⁶⁰

1. BPD desa Pujon Kidul

BPD merupakan lembaga desa yang di bentuk sebagai langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dimana BPD berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun susunan Kepengurusan dalam BPD Desa Pujon Kidul adalah sebagai berikut:

Ketua : Choirul Anam, S.H

Wakil Ketua : Nur Kholiq

Sekretaris : Ali Mukhtar

Anggota : Suyanto

Anggota : Musofa

2. LPMD Desa Pujon Kidul⁶¹

LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Adapun susunan Kepengurusan dalam LPMD Desa Pujon Kidul adalah sebagai berikut:

Ketua : Subandi

Wakil Ketua : H. Miskan

⁶⁰Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*”, hal.14.

⁶¹Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*”, hal. 3-4.

Sekretaris	: Muslimin
Bendahara	: H. Suheri
Seksi Keagamaan dan Sosial	: Surahman
Seksi Pendidikan, Penerangan,Keamanan	: Handoyo
Seksi Kesehatan dan KB	: Mulyono
Seksi Pemuda dan Olahraga	: Samsul Hadi
Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	: Sugianto
Seksi Koperasi dan Ekonomi	: Akhmismanu
Seksi Seni Budaya dan Pemberdayaan	
Perempuan	: Janib

4.1.2.(d) Data Penduduk⁶²

Data penduduk Desa Pujon Kidul berdasarkan profil desa dan kelurahan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk : 4.377 Jiwa
 - Laki-laki : 2.212 Jiwa
 - Perempuan : 2.165 Jiwa
2. Jumlah KK : 1.258 Jiwa

4.1.2.(e) Orbitasi Wilayah⁶³

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu:

Sebelah Utara	: Desa Pujon Lor
Sebelah Timur	: Desa Pujon Lor
Sebelah Selatan	: Hutan Perhutani

⁶²Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*, hal. 4.

⁶³Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*, hal. 4.

Sebelah Barat : Desa Sukomulyo

4.1.2.(f) Sarana Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul, di perlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pujon Kidul masih mengandalkan ADD, PNPM-P, menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. Adapun sarana prasarana yang ada di Desa Pujon Kidul adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1.Sarana Ibadah Menurut data yang diperoleh, masyarakat Desa Pujon Kidul yang sepenuhnya menganut agama Islam, maka sarana ibadah yang tersediapun hanya masjid (5 buah) dan musholla (36 buah), Majelis Ta'lim (10 buah), TPQ (3 buah).
- 2.Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal Distribusi jumlah sarana pendidikan formal dan non formal yang terdapat di Desa Pujon Kidul dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

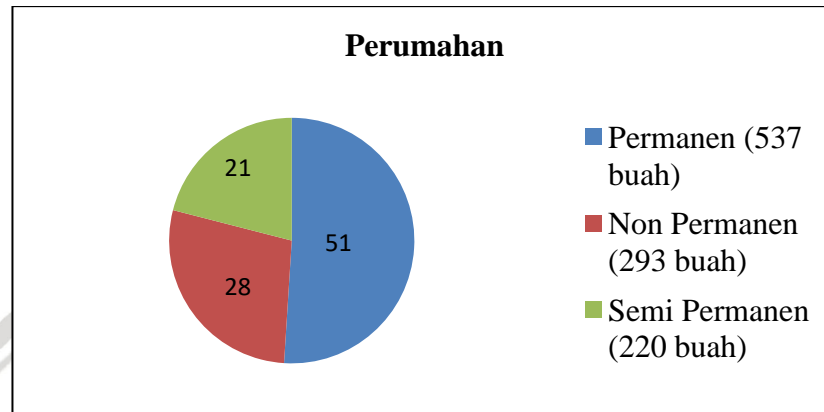
No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
Formal		
1.	Play Group	1
2.	TK	3
3.	SD/Sederajat	3
4.	SMP/Sederajat	1
5.	SMA/Sederajat	-
Non Formal		
1.	TPQ	2

Sumber: diolah penulis dari “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*). Hlm. 15

⁶⁴Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*), hal. 16.

3. Perumahan Distribusi jumlah perumahan yang terdapat di Desa Pujon Kidul dapat dilihat pada Gambar 4.1 :

Gambar 4.1 Distribusi Jumlah Perumahan



Sumber : diolah penulis dari “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*).

Berdasarkan Gambar diatas, di Desa Pujon Kidul masih ditemukan perumahan non permanen sebanyak 293 buah (28%) dari total perumahan yang ada yaitu 1050 buah.

4. Organisasi Masyarakat

Ada beberapa organisasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat, yaitu PKK, LPMD, karang taruna, dan pokdarwis. Distribusi jumlah organisasi masyarakat yang terdapat di Desa Pujon Kidul dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Jumlah Organisasi Masyarakat

No.	Organisasi Masyarakat	Jumlah
1.	PKK	1
2.	LPMD	1
4.	Karang Taruna	1
5.	Pokdarwis	3

Sumber: diolah penulis dari “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul*

5. Sarana Kesehatan yang terdapat di Desa Pujon Kidul yaitu sebuah Poskesdes dan 5 buah Posyandu.
6. Tenaga Kesehatan Distribusi jumlah tenaga kesehatan di Desa Pujon Kidul terdapat satu perawat, satu mantri, satu bidan, dan 33 kader kesehatan.

4.1.3 Kondisi Ekonomi⁶⁵

Kegiatan perekonomian Desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan yang merupakan mata pencaharian masyarakat setempat. Mengingat wilayah Desa Pujon Kidul 65% persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat, selain itu tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Pujon Kidul namun wilayah lain juga keadaanya.⁶⁶ Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Pada tahun 2014 Desa Pujon Kidul ditetapkan sebagai desa wisata yaitu wisata alam pedesaan, dengan ditetapkan Desa Pujon Kidul sebagai Desa Wisata maka terbentuklah lembaga POKDARWIS yang menangani semua kegiatan wisata di Desa Wisata Pujon Kidul, yang pada tahun 2015 menjadi juara I POKDARWIS Tingkat Jawa Timur.

⁶⁵Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*”, hal. 4-5.

⁶⁶Kondisi Umum Desa Pujon Kidul” diakses dari <http://pujonkidul.desa.id/kondisi-umum/> pada tanggal 12 mei 2018 pukul 22:42

Pada tahun 2016 Desa Pujon Kidul menjadi nominasi dari beberapa Desa Wisata yang ada di Kabupaten Malang menjadi peserta Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata tahun 2016, Desa Pujon Kidul masuk dalam lima besar dalam pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*).

a. Potensi Unggulan Desa

Adapun potensi Desa Wisata Pujon Kidul adalah sebagai berikut:

1. Pertanian Desa Pujon Kidul adalah desa agraris yang hampir seluruh wilayah pertaniannya dipergunakan untuk padi (8,5 ton/Ha), selebihnya dipergunakan untuk palawija; sayur: Tomat, labu siam, kubis, sawi, wortel; dan buah-buahan: Apel, jambu biji, stroberi, alpukat.
2. Peternakan dan Hasil Peternakan mayoritas peternakan yang terdapat di Desa Pujon Kidul adalah sapi perah sebanyak 718 ekor yang menghasilkan susu sapi sekitar 6500 liter perhari. Selain peternakan sapi dan kambing, penduduk Desa Pujon juga ada yang memiliki peternakan ayam baik ayam kampung maupun ayam ras dengan hasil peternakannya berupa telur ayam. Namun, masih belum ada yang mencatat atau yang mendukung adanya peternakan ayam maupun hewan lainnya beserta hasil peternakannya.
3. Perdagangan dan Jasa Penduduk Desa Pujon Kidul melakukan aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dan pangan mereka melalui kios, toko, dan warung. Pasar tradisional maupun pasar modern atau swalayan masih belum ada di Desa Pujon Kidul. Rata-rata penduduk melakukan aktivitas berdagang setiap hari sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 malam.

Namun untuk jumlah kios, toko, dan warung yang terdapat di Desa Pujon Kidul masih belum ada data yang mendukung.

4. Wisata Desa Pujon merupakan Desa Wisata. Terdapat beberapa tempat yang memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata di Desa Pujon Kidul. Hal tersebut berguna untuk menunjang pemasukan desa dan memberdayakan sumber daya manusia masyarakat Pujon Kidul. Beberapa objek wisata di Pujon Kidul, antara lain: Sumber pitu, edukasi pertanian dan peternakan, kebun petik stroberi, café sawah, dan sumber saleh.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan : lele, ayam, kambing, sapi. Dalam data Profil Desa Tahun 2017 disebutkan bahwa:

Potensi Umum : Sedang

Potensi Sumber Daya Alam : Sedang

Potensi Sumber Daya Manusia : Sedang

Potensi Kelembagaan : Baik

Potensi Sarana dan Prasarana : Sedang

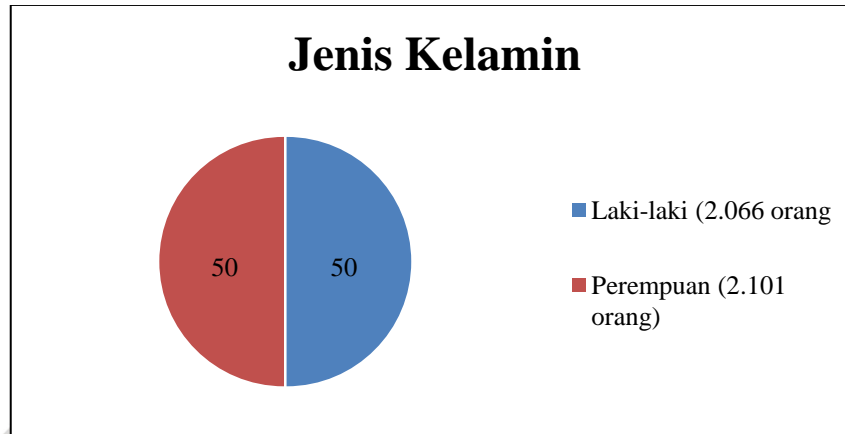
4.1.4 Kependudukan⁶⁷

- a. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Pujon Kidul adalah 4.167. jiwa, dengan rincian 2.066. laki-laki dan 2.101. Perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.330 KK.

⁶⁷ Dari dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017*”, hal. 6.

Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.2 :

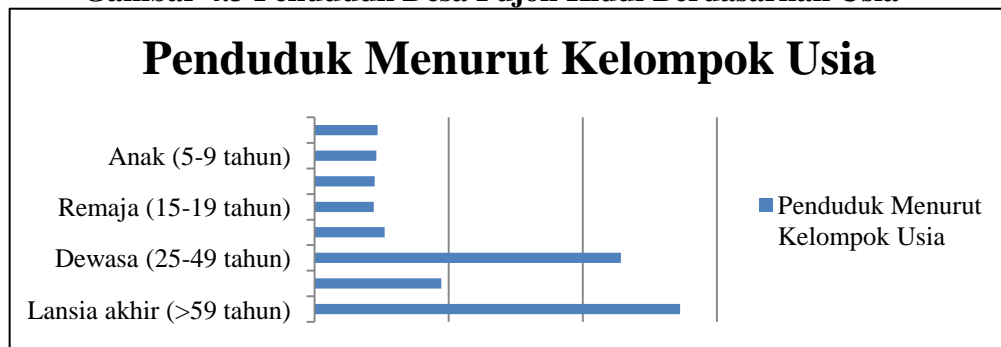
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber : diolah penulis dari “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017*”

- b. Jumlah Penduduk menurut Agama Jumlah penduduk menurut agama di Desa Pujon Kidul secara keseluruhan berjumlah 4.167 (100%) jiwa merupakan pemeluk agama Islam. Oleh karena itu terdapat berbagai macam acara keagamaan yang diadakan di Desa Pujon Kidul, contohnya yasinan.
- c. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pujon Kidul maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Jumlah penduduk Desa Pujon Kidul berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 4.3:

Gambar 4.3 Penduduk Desa Pujon Kidul Berdasarkan Usia



Sumber : diolah penulis dari “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017*”

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur kependudukan di Desa Pujon Kidul sebagian besar penduduknya merupakan penduduk yang berada di usia lansia akhir yaitu usia >59 tahun sebanyak 1.362 jiwa atau sekitar 32% dari total penduduk di Desa Pujon Kidul yang menggambarkan dari harapan hidup lebih lama.

Sedangkan jumlah penduduk terbanyak ke 2 merupakan kelompok produktif pada usia 20-49 tahun di Desa Pujon Kidul sekitar 1.142 atau 27% dari total penduduk Desa Pujon Kidul berarti jumlah ketergantungan menjadi lebih rendah, dan jumlah balita yang rendah sebesar 235 jiwa (17,6%) dari total jumlah penduduk Desa Pujon Kidul menggambarkan bahwa program KB berlangsung dengan baik. Namun, masih dimungkinkan terdapat penduduk yang ada di Desa Pujon Kidul yang belum tercatat.

4.1.5 Aspek Sumber Daya Alam⁶⁸

Sebagai modal awal pelaksanaan pembangunan Desa wisata di Desa Pujon Kidul, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program

⁶⁸ Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017*”, hal.10.

pembangunan desa wisata yang telah direncanakan dengan baik. sumber daya alam di Desa Pujon Kidul dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Daftar Sumber Daya Alam di Desa Pujon Kidul

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah
1	Lahan Tegalan	240 Ha
2	Lahan Persawahan	87 Ha
3	Lahan Hutan	578 Ha
4	Lahan Perkebunan	500 M ²

Sumber : Diolah oleh penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017”

4.1.6 Aspek Sumber Daya Manusia⁶⁹

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di Desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari suksesnya pelaksanaan pembangunan Desa Wisata. Untuk itu sumber daya manusia di Desa Pujon Kidul dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Pujon Kidul

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Sumber utama penghasilan penduduk	
	a. Pertanian	1.926 orang
	b. Peternakan	1.612 orang
	c. Perdagangan	37 orang
	d. Pertukangan	24 orang
	e. Keterampilan	4 orang
	f. Jasa lain-lain	17 Orang

Sumber : Diolah oleh penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017”

4.1.7 Wilayah Desa

Wilayah Desa Pujon Kidul terdiri dari 3 (tiga) dusun. 9 (Sembilan) RW, dan 18 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

⁶⁹Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017, hal.10.

Tabel 4.6 Data wilayah administrasi desa pujon kidul

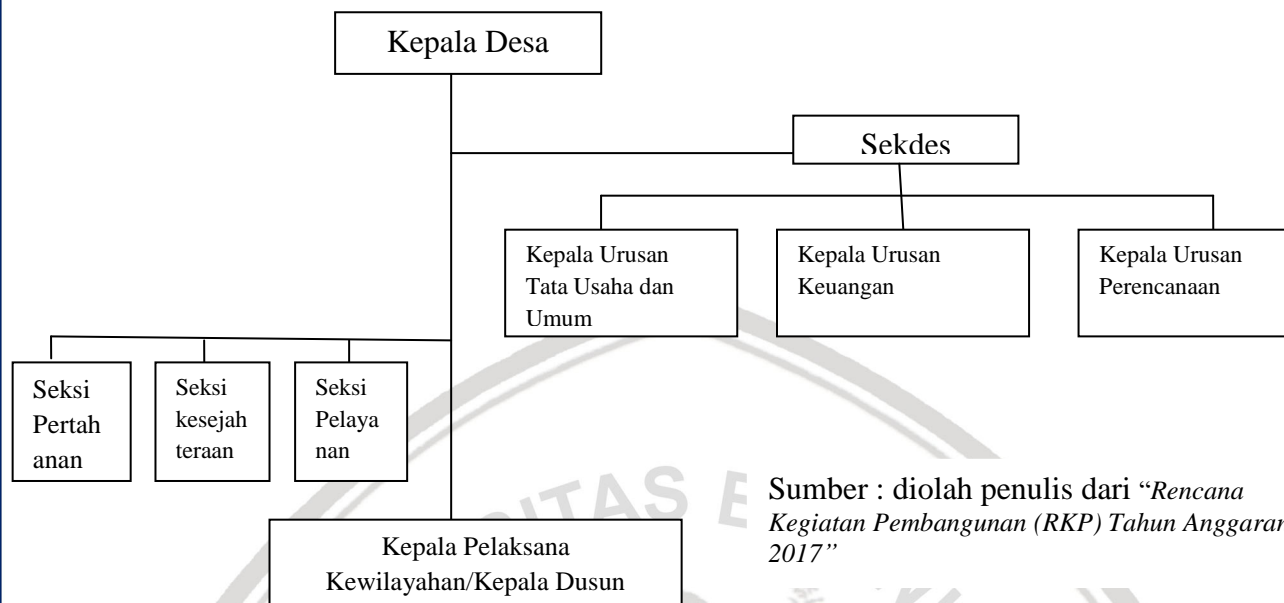
No.	Wilayah	Nama Ketua RT
A	Dusun Krajan	
1	RT.01 RW.01	Sa'i
2	RT.02 RW.01	Usman
3	RT.03 RW.02	Baidur Rohim
4	RT.04 RW.02	Mu'alifin
5	RT.05 RW.03	Umar
6	RT.06 RW.03	Jinurung
7	RT.07 RW.04	Juma'i
8	RT.08 RW.04	Tukiran
9	RT.09 RW.05	Payar
10	RT.10 RW.05	Iswanto
11	RT.11.A RW.06	Raseman
12	RT.11.B RW.06	Kurniadi
B	Dusun Maron	
13	RT.12 RW.07	Sumantono
14	RT.13 RW.07	Suparman
15	RT.14 RW.07	Sudarsono
16	RT.15 RW.08	Nurhadi
17	RT.16 RW.08	Prayitno
C	Dusun Tulungrejo	
18	RT.17 RW.09	Basuki
19	RT.18 RW.09	Paiman

Sumber : Diolah oleh penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017 Desa Pujon Kidul”

4.1.8 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, maka struktur organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul



Sumber : diolah penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017”

4.2 Visi dan Misi Desa Pujon Kidul⁷⁰

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa Pujon Kidul yang GUYUB RUKUN (Gotong Royong), Usaha, Yakin, Ulet, Bertakwa, Rukun, Kreatif, Unggul) untuk mewujudkan masyarakat yang Guyub, di perlukan kesadaran untuk Gotong Royong, sehingga Usaha yang di rintis, dengan penuh keyakinan, serta ulet yang dimiliki masing-masing warga yang berlandaskan taqwa kepada Tuhan YME.

Dengan bermodalkan rukun (bersatu), baik rukun antar warga, keluarga serta pihak pemerintah desa yang dibarengi kinerja handal tanpa putus asa. Kreatifitas dan kerjasama antara warga juga pemerintah desa, mutlak di butuhkan guna mewujudkan cita-cita bersama menjadikan Desa Pujon Kidul sebagai desa unggul

⁷⁰Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017), hal.6.

yang selalu berprestasi yang memegang falsafah jawa: “toto, titi, tentrem, kerto tur raharjo”. “Baldatun toyyibatun warobbun ghofur”.

b. Misi

- Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
- Mewujudkan pemerintahan *bersih berwibawa* (tata kelola pemerintahan yang baik, (ex: pendataan asset desa beserta pemanfaatannya), berkeadilan, dan demokratis (ex: rembuk desa, sebagai landasan musyawarah mufakat).
- Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi potensi kaum muda di dalam berperan aktif kegiatan desa.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sector pertanian, peternakan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana prasarana)
- Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.

BAB V

MEKANISME PADA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERKAIT PENGELOLAAN DESA WISATA PUJON KIDUL BESERTA DAMPAKNYA

5.1 Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul

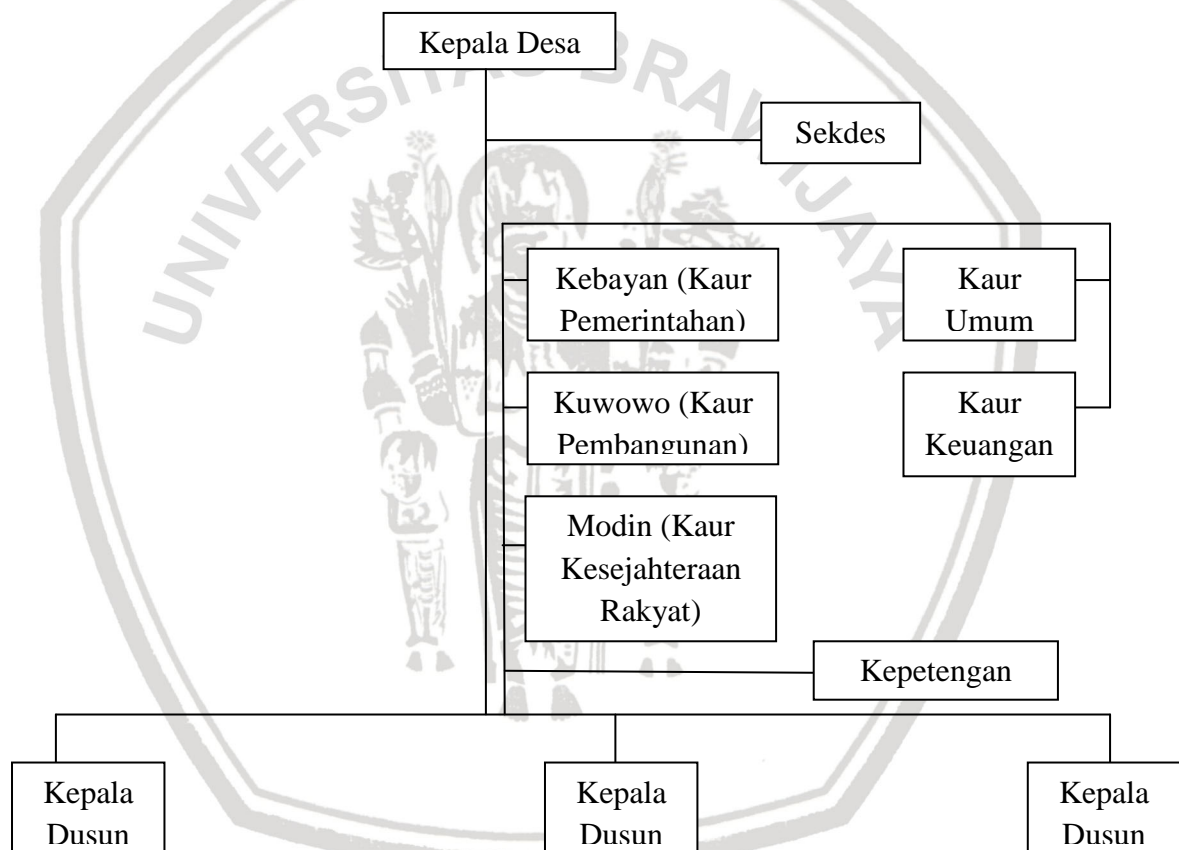
Sebelum membahas mengenai tata kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul, maka penulis lebih dulu akan menjelaskan mengenai pergeseran Desa Wisata sebelum diberlakukannya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 hingga ditetapkan sebagai Desa Wisata, sebagai berikut:

Dari sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.6 / 2014, terdapat kemiripan. Sebelum diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa, Desa berpijak pada Otonomi asli desa yang merupakan esensi dari pemerintahan desa dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengelola desa berdasarkan pada hak rekognisi (hak asal usul desa) serta hak Subsidiaritas (kewenangan lokal desa). Dimana hal tersebut sejatinya terkandung pula dalam UU No.6 / 2014 tentang Desa, dimana pada hakekatnya dengan adanya peraturan perundangan tersebut pemerintah ingin mengembalikan kewenangan desa dalam mengelola dan mengatur rumah tangga desa berdasarkan pada adat istiadat dan budaya masyarakat setempat pedesaan. Hal tersebut juga berlaku dalam hal perangkat desa, karena memang perangkat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan desa selain adanya Kepala Desa dan Musyawarah Desa.

Sedangkan dalam hal struktur perangkat desa dari sebelum diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa sampai dengan sekarang setelah diberlakukannya

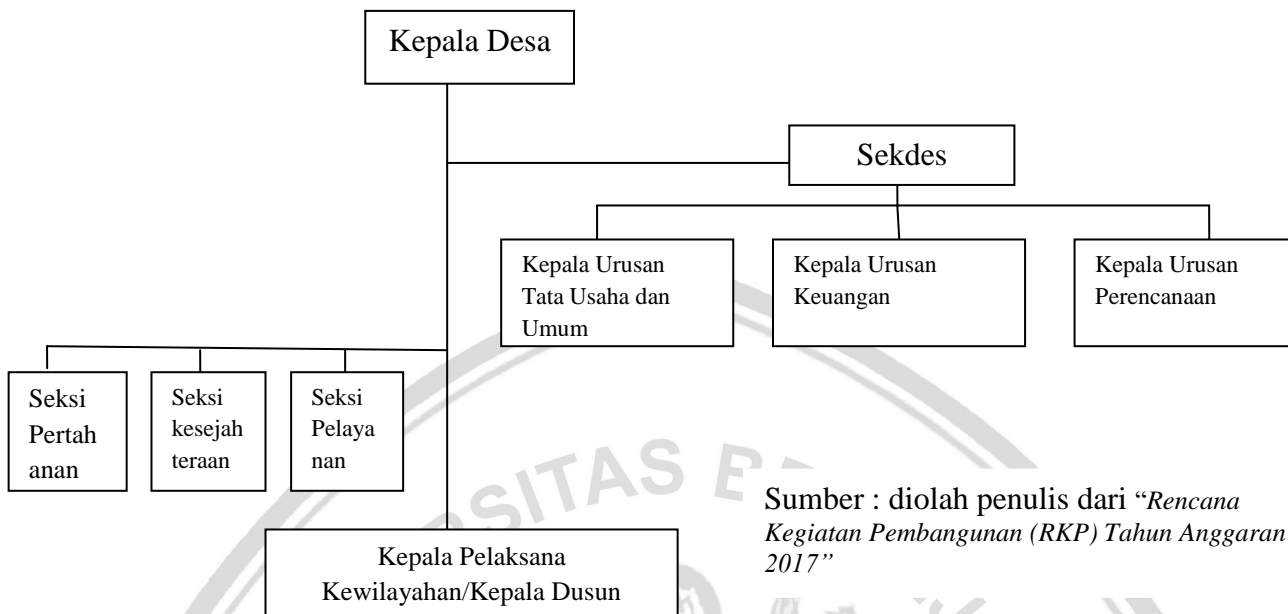
UU No.6 / 2014 tentang Desa, juga hampir terdapat kemiripan dalam hal fungsi, peran dan tugas pokoknya. Begitu juga dalam hal proses rekrutmen dan kesejahteraan perangkat desa. Dimana tugas utama dari perangkat desa adalah membantu tugas dan kewenangan daripada Kepala Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya. Namun terdapat sedikit perbedaan pada struktur perangkat/struktur pengelola dalam hal susunannya yaitu sebagai berikut:

Bagan 5.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul Tahun 2012 sebelum diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa



Sumber : diolah penulis dari "<http://etheses.uin-malang.ac.id/3053/1/11520059.pdf>"

**Bagan 5.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul Tahun 2017
sesudah diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa**



Selain itu pergeseran juga terlihat pada segi pendanaan dan pengelolaan keuangan Desa terutama terkait Bumdes. Peran Bumdes bersama Kepala Desa sebelum diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa yang pada awalnya unit usaha yang dikelola Bumdes Desa Pujon Kidul yaitu Bumdes Sumber Sejahtera melalui pengelolaan sampah dan air bersih atau biasa dikenal HIPPAM dimana modal awal yang dikelola Bumdes sumber dananya berasal dari bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.

Sedangkan sesudah diberlakukannya UU No.6 / 2014 tentang Desa, peran Bumdes bersama Kepala Desa semakin luas yaitu dengan adanya pengelolaan homestay, pengelolaan hasil peternakan, pengelolaan hasil pertanian, pengelolaan seni tari, dan pengelolaan agrowisata petik apel dengan sumber dana yang berasal dari PAD dan dana desa. Hingga akhirnya terdapat sumber dana tambahan yang berasal dari pendapatan lain-lain berupa sumbangan dari pihak ke-3 yaitu BNI

yang kemudian digunakan oleh Kepala Desa untuk lebih mengembangkan Desa menjadi Desa Wisata dengan memanfaatkan tanah bengkok Desa Pujon Kidul untuk mengembangkan Cafe Sawah Desa Pujon Kidul sehingga lahir café sawah yang merupakan produk unggulan Desa Pujon Kidul yang menarik banyak minat wisatawan dan merauk omzet yang besar. Dengan ditetapkannya Desa Pujon Kidul sebagai Desa Wisata kemudian terbentuk POKDARWIS yang menaungi kelompok pemuda, kelompok tani dan kelompok ternak untuk bekerja bersama Kepala Desa dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul.

Tata kelola Pemerintahan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah di atur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹

Penjelasan lebih spesifik mengenai desa terkait pengelolaan desa wisata terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 66 tentang penghasilan Pemerintah Desa, dimana ditegaskan bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dan Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa

⁷¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Dengan demikian sangat jelas bahwa Undang-undang ini memperlihatkan kemampuan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Undang-Undang tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dalam artian dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.⁷²

Kemandirian merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa.⁷³ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan seperti yang sedang dilakukan oleh Desa Pujon Kidul saat ini melalui pengembangan Desa Wisata.

Pembangunan pemerintahan desa di Desa Pujon Kidul dilakukan melalui pengembangan pariwisata dengan konsep desa wisata sebagai usaha untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dan memajukan desa dengan

⁷²Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, (2015), *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*, Fokusmedia: Bandung, hal.1.

⁷³<http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/pembaharuan-penyelenggaraan.html>(diakses pada 13 mei 2018 , pukul 09.11 WIB)

peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat yang berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Pembangunan kepariwisataan yang dijalankan Pemerintah Desa Pujon Kidul diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas untuk mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.⁷⁴

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa pad Desa Wisata Pujon Kidul di fokuskan pada kerjasama antara Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa, dan partisipasi masyarakat desa untuk bekerja bersama-sama dalam mengelola dan mengembangkan Desa Pujon Kidul menjadi Desa Wisata yang terus berkembang.

Hal tersebut menjadi suatu penekanan tersendiri karena sudah sejak lama masyarakat di pedesaan selalu bertumpu kepada pihak lain dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang terjadi karena adanya sebab akibat baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya. Sejak lama pemerintah bertindak sebagai agen pembangunan dimana pihak pemerintah selalu menempatkan diri sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan, mulai dari segi perencanaan atau pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa kegiatan pembangunan adalah merupakan kewajiban pemerintah sehingga yang terjadi selama

⁷⁴<http://journal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Pembangunan/article/view/48>.(diakses pada Jumat 24 november 2017 , pukul 09.11 WIB)

ini pihak masyarakat seolah-olah menjadi “Penonton dan Menjadi Penerima” dari kegiatan pembangunan.⁷⁵ Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola budaya masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa.

Oleh karena itu pemerintah desa Pujon Kidul harus melibatkan seluruh elemen termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan desa hingga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Mulai dari perencanaan atau pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar pembangunan dalam hal ini pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya pemerintah desa tapi masyarakat desa juga harus berperan aktif dan berpartisipasi untuk mengembangkan desanya. Disini, Pemerintah dapat berperan menjadi “fasilitator dan motivator” sedangkan masyarakat dapat dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan. Adanya kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang terkait dalam mengembangkan desa wisata dirasa akan mampu merangsang perekonomian masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa wisata, baik pemerintah maupun masyarakat harus menekankan pada upaya pengoptimalan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Desa Pujon Kidul untuk di kembangkan agar dapat di maksimalkan dalam pengembangan desa wisata, mengingat Desa Pujon Kidul memiliki potensi alam yang melimpah.

Jika dikaitkan dengan konsep Village Governance yang dikemukakan oleh Qingshan Tan yang mengemukakan bahwa Pemerintahan desa mengacu pada pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi desa yang membawa

⁷⁵Erwin. (Skripsi): “tata kelola pemerintahan desa dalam negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan-undang-Undang-nomor-6-tahun-2014”, <http://Bab%25203%2520Erwin%2520reff.pdf>, hlm.7, (diakses pada 10 mei 2018 pukul 14.00 WIB)

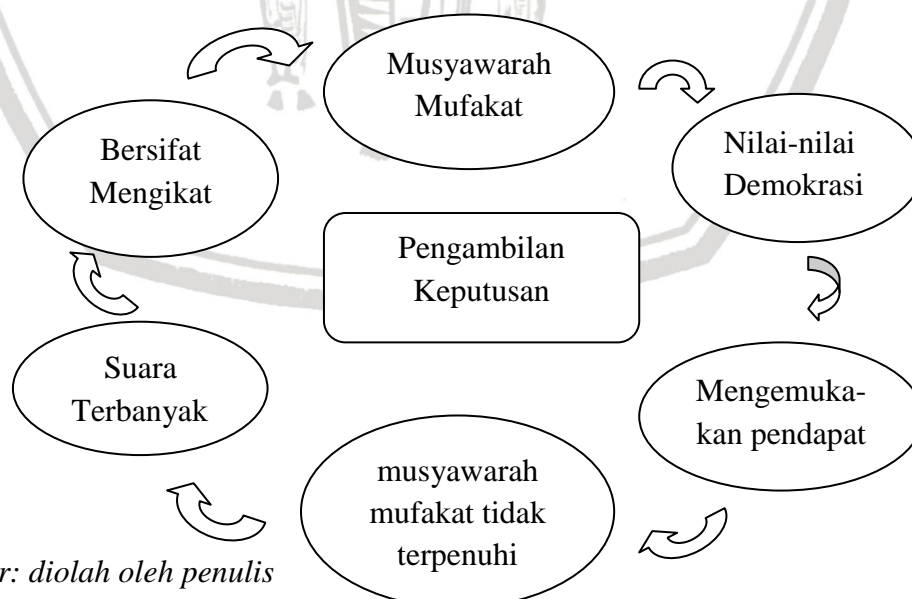
perubahan positif berupa kesejahteraan dalam kehidupan desa. Maka penjelasan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa Wisata di Desa Pujon Kidul yang sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Qingshan Tan dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1 Pengambilan Keputusan Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul

5.1.1.(a) Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa

Pengambilan keputusan pada tata kelola Pemerintahan Desa dalam upaya pembangunan Desa diselenggarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dalam tata kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul tercantum dalam Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pujon Kidul Undang-undang nomor 2 dan 3 tentang peraturan Desa Pujon Kidul tentang rencana kerja Pemerintah Desa Pujon Kidul tahun 2016 pasal 6 tentang mekanisme pengambilan keputusan yaitu:⁷⁶

Bagan 5.3 Mekanisme pengambilan keputusan dalam tata kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul



Sumber: diolah oleh penulis

⁷⁶Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam "Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017", hal.13.

1. Mekanisme pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa wajib mengembangkan nilai-nilai Demokrasi dalam mengambil keputusan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian di pandang cukup untuk diterima oleh musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang di musyawarahkan.
4. Jika pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
5. Keputusan berdasarkan suara terbanyak di ambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat di pertemuan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah yang lain.
6. Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini yang diputuskan yaitu terkait Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) oleh para pemangku kepentingan desa untuk mencapai rencana kerja yang kemudian akan disepakati bersama untuk kemajuan desa dan untuk mengatasi permasalahan desa. Adapun hasil dari Musrenbang desa terdiri dari beberapa hal, yaitusebagai berikut:

1. Adanya penjabaran mengenai evaluasi hasil pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya serta capaian kinerja program pembangunan Desa.
2. Penjabaran mengenai rencana kerja Pemerintah Desa beserta kebijakan pengelolaan keuangan desa.

5.1.1.(b) Pengambilan Keputusan Pada Pengelolaan Desa Wisata

Pengambilan keputusan pada tata kelola Pemerintahan Desa terkait pengelolaan Desa Wisata diselenggarakan melalui Musyawarah Desa yang merupakan proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah dijadikan sarana atau forum dalam pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penjelasan di atas diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:⁷⁷

“ya jadi hak asal usul desa yang tidak bisa dihilangkan itu adalah musyawarah baik musyawarah desa maupun Musrenbangdes, dan itu diakui oleh Undang-undang. Jadi setiap keputusan terutama yang berkenaan dengan pembangunan kemudian arah kebijakan pembangunan itu meskipun sudah ada visi misi kepala desa tapi musyawarah menjadi hal yang mutlak. Jadi di dalam musyawarah itulah kita melibatkan masyarakat.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan di Desa Wisata Pujon Kidul terkait pengelolaan Desa Wisata diselenggarakan melalui musyawarah desa. Keputusan yang diambil dalam hal ini adalah keputusan terkait rencana pengembangan Desa Wisata dengan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Pujon Kidul berupa potensi peternakan, pertanian, seni/budaya, maupun potensi alam guna mensejahterakan Desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Hasil keputusan yang diambil pada musyawarah Desa berupa rencana strategis seperti pembentukan BUMDes. Dimana BUMDes dalam hal ini merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengembangan desa wisata. Karena tujuan dibentuknya BUMDes adalah sebagai pendorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki sekaligus mengemban misi pemberdayaan potensi desa. Selain pembentukan BUMDes, juga membentuk POKDARWIS yang merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya serta sebagai upaya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di desa. Penjelasan di atas diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:⁷⁸

“bicara tentang hasil keputusan ya tentu saja yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, yang pertama BUMDes karena BUMDes disini Sebagai sebuah usaha desa yang pembentukannya benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Begitupun dengan POKDARWIS mbak, perannya krusial sekali makannya dalam musyawarah Desa juga kami bahas sedemikian rupa”.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.40

5.1.1.(c) Pengambilan Keputusan Melalui Tahlil Kubro

Selain melalui musrenbangdes dan musdes, pengambilan keputusan juga dilakukan di beberapa kesempatan lain di luar musyawarah resmi desa seperti dalam acara Tahlil Kubro.⁷⁹ Tahlil Kubro merupakan kegiatan rutin yang di agendakan oleh jama'ah tahlil sedesa pujonkidul yang di laksanakan setiap tiga bulan sekali.dalam acara ini di isi juga dengan pengajian. tahlil kubro ini juga di hadiri oleh kepala Desa Pujonkidul Udi Hartoko,Perangkat Desa, Tokoh agama, Ketua RT dan RW.

Tahlil Kubro diadakan untuk menjaga tali silaturahmi bagi masyarakat Desa Pujon Kidul dan juga merupakan salah satu cara untuk membangun desa karena membangun bukan hanya fisik dan insfrastur saja tetapi membangun mental juga lebih penting. Dalam berbagai sambutannya Kepala Desa Pujon Kidul berpesan untuk menjaga kerukunan ditingkatan lingkungan, menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah ditingkatan lingkungan atau kelompok masyarakat, dan agar masyarakat dapat lebih memajukan Desa Wisata Pujon Kidul dengan ikut berpartisipasi dan mendukung setiap program desa wisata yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa untuk Kesejahteraan bersama.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:⁸⁰

“disini kita sadar begitu pentingnya peran dari masyarakat sehingga kita terus berusaha menyampaikan mengenai pembangunan desa di berbagai kesempatan agar masyarakat dapat menyiapkan mental bersama kami

⁷⁹Tahlil Kubro Sebagai Sarana Silaturahmi dan Membangun Mental” diakses dari <http://D:/Tahlil%20Kubro%20Sebagai%20Sarana%20bersilaturrahi%20dan%20Membangun%20Mental%20-%20Desa%20Wisata%20Pujon%20Kidul.html> pada 14 mei 2018 pukul 14.45

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

membangun desa untuk kesejahteraan bersama, ya salah satunya di acara Tahlil Kubro ini.”

Adanya musyawarah melalui tahlil kubro ini dikarenakan kurang efektifnya pengambilan keputusan melalui musdes, dimana dari beberapa unsur masyarakat yang seharusnya ikut andil dalam musdes tidak ikut berpartisipasi sehingga pengambilan keputusan melalui musdes dirasa tidak efektif, maka digunakanlah tahlil kubro sebagai sarana musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan Desa Wisata karena pada acara tahlil kubro masyarakat lebih antusias untuk datang.

5.1.1.(d) Pengambilan Keputusan Melalui Kegiatan Pemetaan/Mapping

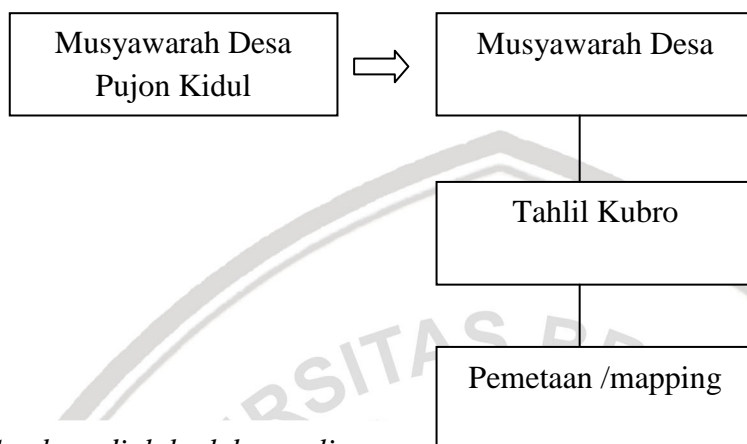
Selain pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah resmi Desa dan Tahlil kubro, terdapat pula kegiatan pemetaan atau mapping yang dilakukan guna mengadakan musyawarah langsung dengan seluruh masyarakat ditingkatan RT seperti yang di jelaskan oleh Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul sebagai berikut:⁸¹

“jadi kami mengadakan musyawarah itu bukan hanya musyawarah di lingkup itu saja. Saya menyadari bahwa tidak akan efektif menyerap aspirasi masyarakat karena yang datang pada musyawarah resmi hanya perwakilan saja. pada tahun 2014 kami juga melakukan kegiatan pemetaan yang melibatkan masyarakat. Jika biasanya pada musrenbang dan musyawarah lainnya hanya melibatkan perwakilan dari masyarakat, dalam pemetaan atau mapping dalam mengalih potensi kemudian arah kebijakan pembangunan itu kita musyawarah dengan seluruh masyarakat tingkatan RT, 21 malam kita berkumpul, bermusyawarah dan terjun ke lapangan tujuannya untuk mengajak ngomong masyarakat mengenai usulan kegiatan apa, kebutuhannya apa baik dari sisi pembangunan fisik maupun non fisik, sosial, budaya, pendidikan, semua kita bicarakan disitu termasuk mengenai konsep desa wisata.”

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.31

Penjelasan di atas mengenai pengambilan keputusan dan musyawarah Desa Pujon Kidul diatas dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan 5.4 Pengambilan Keputusan di Desa Pujon Kidul



Sumber: diolah oleh penulis

Partisipasi ataupun peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan khususnya pada pengembangan Desa Wisata tentunya sangat diperlukan. Jika semua elemen dapat bekerja sama membangun desa maka tujuan Desa untuk membangun desa menjadi desa wisata untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa akan tercapai. Namun untuk mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi adalah hal yang tidak mudah, seperti di desa Pujon Kidul ini.

Diperlukan upaya dari pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat sehingga seluruh masyarakat desa dapat berperan aktif dalam pengembangan desa wisata agar masyarakat juga dapat merasakan dampak positif dari adanya desa wisata tersebut yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa mengingat ekonomi di Desa Pujon Kidul masih terbilang lemah seperti yang di

jelaskan oleh Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota POKDARWIS sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul:⁸²

“kita bersama pemerintah desa mengusulkan desa wisata ini memang untuk mensejahterakan masyarakat karena keadaan ekonomi di Desa Pujon Kidul ini masih terbilang lemah, karena masih banyaknya pengangguran dan anak putus sekolah. Kita merangkul semua masyarakat untuk ikut membangun desa, seperti rumah tangga miskin dan pengangguran yang sebagian besar adalah anak-anak putus sekolah, kami rangkul agar bisa bergabung untuk mengelola desa wisata khususnya wisata alam café sawah ini. Ya tujuannya agar rumah tangga miskin ini tadi dapat memenuhi kebutuhannya. Partisipasi dari masyarakat tentu sangat membantu sekali, toh ramainya tempat ini yang menikmati ya masyarakat kita sendiri, mereka sendiri yang menikmati.”

Masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan artinya, masyarakat adalah elemen penting yang harus berperan aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan dengan pemangku kepentingan baik dari Pemerintah Desa maupun swasta. Selain itu masyarakat juga memiliki peran serta tanggung jawab dalam tercapainya keberhasilan pengembangan desa wisata di wilayah tempat tinggalnya.

Dari adanya pengambilan keputusan diatas menimbulkan suatu tanggapan dari masyarakat atas keputusan yang diambil terkait pengembangan desa wisata. Dalam tata kelola Pemerintahan Desa Wisata pada proses pengambilan keputusan ini tanggapan dari masyarakat sangat kurang, hal ini yang dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan, dimana masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai konsep Desa Wisata. Hal ini di perkuat dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:⁸³

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.37

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

“yang sangat di sayangkan bahwa masyarakat kita ini banyak yang tidak memahami mengenai konsep desa wisata. Dari segi alam, sosial, maupun budaya.”

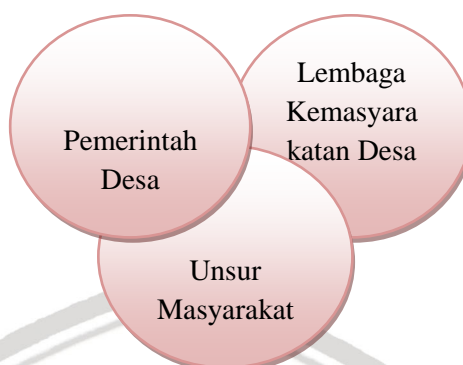
5.1.2 Pelaksanaan Keputusan Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul

Pada pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata diawal pembangunannya, Pemerintah Desa menggunakan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa, dimana pada awalnya dana tersebut digunakan untuk mendirikan BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul dan infrastruktur, Kemudian Dana Desa tersebut digunakan oleh Kepala Desa Udi Hartoko sebagai modal awal mengembangkan desa wisata.⁸⁴ Kemudian rencana pengembangan Desa Wisata dimatangkan, dan selanjutnya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa wisata pada upaya Pembangunan Desa dan pengembangan Desa Wisata atau dalam kegiatan desa lainnya, Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa berupaya melibatkan POKDARWIS, Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa Pujon Kidul, dan juga melibatkan masyarakat Desa Pujon Kidul agar dapat berperan ataupun berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan Desa Wisata.⁸⁵

⁸⁴<https://m.medcom.id/jawa-timur/peristiwa-jatim/8Ky4QEXk-bermodalkan-dana-desa-pujon-kidul-jadi-tujuan-wisata> (diakses pada 12 oktober 2018)

⁸⁵Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*), hal.13.

Gambar 5.1 Unsur pelaksana dalam tata kelola pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul



Sumber: diolah oleh penulis

Pemerintah Desa menggerakkan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong yang sesuai dengan visi Desa Pujon Kidul⁸⁶ yaitu Terwujudnya Masyarakat Desa Pujon Kidul yang GUYUB RUKUN (Gotong Royong), Usaha, Yakin, Ulet, Bertakwa, Rukun, Kreatif, Unggul) untuk mewujudkan masyarakat yang Guyub, diperlukan kesadaran untuk Gotong Royong, sehingga Usaha yang dirintis, dengan penuh keyakinan, serta ulet untuk memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Dalam tata kelola pemerintahan desa tentu tidak hanya pemerintah desa yang berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul. Terdapat pula lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan desa seperti yang di sebutkan dalam pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:⁸⁷

- a. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

⁸⁶Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*), hal.6.

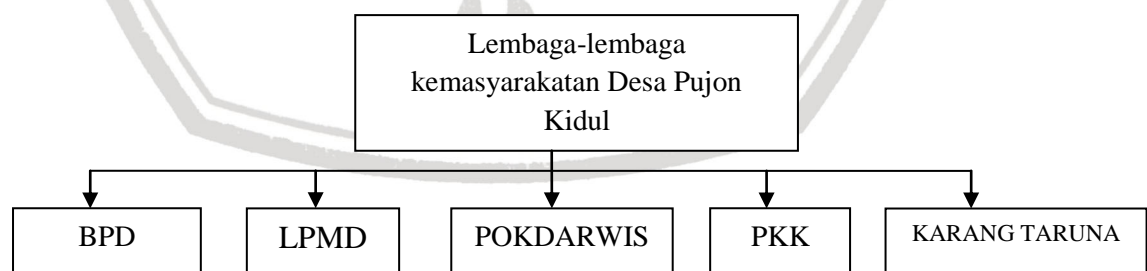
⁸⁷Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- c. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Dalam tata kelola pemerintahan Desa Pujon Kidul terdapat beberapa Lembaga kemasyarakatan yang turut andil dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Wisata, diantaranya yaitu: LPMD, BPD, PKK, POKDARWIS, dan Karang Taruna yang tergambar pada bagan 5.5 tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa Pujon Kidul sebagai berikut:

Bagan 5.5 Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa Pujon Kidul



Sumber: Data diolah oleh penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Pujon Kidul Tahun Anggaran 2017”

LPMD bertugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Kemudian terdapat

PKK sebagai lembaga yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata. Setelah itu terdapat kelompok karang taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Namun di Desa Pujon Kidul, karang taruna kurang bekerja.⁸⁸ Tidak bekerjanya karang taruna tersebut dikarenakan perannya dikalahkan oleh POKDARWIS yang lebih mendominasi. Adanya permasalahan ini seharusnya dapat segera ditangani oleh Pemerintah Desa agar semua lembaga kemasyarakatan di Desa Pujon Kidul dapat saling bekerja sama untuk membangun Desanya.

Kemudian yang paling penting adalah BPD yang berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimana dikelola oleh BUMDes dan Kepala Desa sebagai pembina. BUMDes Desa Pujon Kidul yaitu BUMDes Sumber Sejahtera yang merupakan badan usaha milik Desa Pujon Kidul yang kegiatannya adalah menggali potensi yang ada di Desa guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pedesaan, dan membantu program peningkatan ekonomi nasional dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. PERMENDES NO 4 Tahun 2014
4. PERDA NO 20 Tahun 2006

⁸⁸Tujuan, Tugas Karang Taruna” diakses dari <https://tunas63.wordpress.com/2009/12/27/tujuan-tugas-dan-fungsi-karang-taruna/> pada 16 mei 2018 pukul 12.29 WIB

5. PERDES NO 6 Tahun 2015

Dalam mengelola Desa Wisata Pujon Kidul, BUMDes bekerja dengan POKDARWIS yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dibandingkan dengan karang taruna, POKDARWIS adalah yang paling berperan aktif dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul seperti yang di jelaskan oleh Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:⁸⁹

“Iya, jadi begini, POKDARWIS adalah satu kelompok yang memang fungsinya sebenarnya untuk menjadi menginspirasi, menggagas ya kemudian menggali potensi-potensi sosial, budaya, maupun alam yang bisa di kemas menjadi salah satu atraksi wisata, Itulah POKDARWIS. Tapi seiring berjalannya waktu, sejak di berlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu maka kita akomodir POKDARWIS itu di bawah naungan badan usaha milik desa, menjadi unitnya BUMDes. Sesuai dengan intruksi dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Desa bahwasanya POKDARWIS harus menjadi unit BUMDes karena dia juga pengelola, bukan hanya pengelola tapi juga inspirator atau yang menggagas desa wisata. Jadi disini POKDARWIS perannya sangat besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya karena tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat yang juga menaungi kelompok tani, kelompok ternak, dan yang lainnya.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul:⁹⁰

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.37

“iya betul mbak, disini karang taruna itu ada. Disini ada dua kelompok pemuda, karang taruna dan POKDARWIS. Seperti anak kembar ya mbak jadi salah satunya pasti ada yang kalah, seperti karang taruna ini tidak terlalu berjalan karena kalah mbak dengan POKDARWIS. Tapi pemuda karang taruna juga ada beberapa yang kemudian ikut bergabung dengan POKDARWIS, jadi ya sama sajalah. Mungkin bisa dikatakan POKDARWIS ini menaungi pemuda-pemuda di karang taruna.”

Berdasarkan wawancara di atas, POKDARWIS merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul. Dimana POKDARWIS tidak hanya sebagai inspirator atau penggagas tapi juga sebagai pengelola yang menaungi kelompok tani, dan kelompok ternak.

Kelompok sadar wisata merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk kesadaran masyarakat akan pembangunan pariwisata di daerahnya. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata dapat dipahami sebagai kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagai obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata di Daerah tempat tinggalnya.⁹¹

Pada tahun 2010, melalui Peraturan Kementerian Pariwisata mengeluarkan peraturan tentang sadar wisata, kemudian disusul SK Walikota Batu tentang tim pembina dan kepengurusan POKDARWIS desa/ kelurahan Kota Batu. Kemudian disetiap desa diharuskan membuat POKDARWIS untuk mengelola objek wisatanya sendiri, seperti yang ada di Desa wisata Pujon Kidul, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Udi Hartoko diatas.

⁹¹Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Selain lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa juga berupaya memberdayakan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata untuk mengelola dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Desa Pujon Kidul agar dapat berdampak secara langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

5.1.2.(a) Objek Wisata Café Sawah

Wujud dari pelaksanaannya terlihat dari suksesnya objek wisata café sawah, dimana café sawah di bangun dengan memanfaatkan tanah desa dengan dukungan dana dari APBDes. Dengan modal tersebut Kepala Desa beserta kelompok pemuda dari POKDARWIS mengelolah tanah bengkok Desa menjadi wisata café sawah sebagai objek wisata yang berhasil menarik minat wisatawan sehingga dapat menghasilkan omzet yang sangat besar yaitu sebanyak Rp.4miliar dalam setahun.

Objek wisata alam café sawah dikemas dengan konsep yang unik, Cafe Sawah berdiri di tengah sawah, yaitu sebuah destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, kuliner lokal dan sentuhan modern. Cafe Sawah mulai beroperasi pada 11 Oktober 2016 dan diresmikan pada 12 Maret 2017 oleh Bupati Malang Rendra Kresna. Berdiri di atas lahan milik desa (bengkok) seluas sekitar 8.000 meter persegi, cafe tersebut dikelilingi hamparan sawah yang luas dan di ujungnya terdapat pemandangan pegunungan. Di ujung selatan terdapat Pegunungan Kelet, ujung utara terdapat Pegunungan Dorowati, ujung timur terdapat Pegunungan Lirang dan ujung barat terdapat pemandangan Gunung Kelud.⁹²

⁹² <http://travel.kompas.com> (diakses pada rabu 2 Oktober 2018, pukul 10:01 WIB)

Tujuan dari berdirinya Cafe Sawah ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Pujon Kidul. Para tokoh desa ingin memberikan wadah untuk tempat berkreasi dan berinovasi pemuda di desanya. Harapan yang ingin dicapai adalah ketika para pemuda sudah lulus dari bangku sekolah tidak pergi merantau keluar desa, namun menjadi penggerak yang akan memajukan desa. Sehingga muncullah ide yang dimulai dari memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Desa Pujon Kidul seperti hamparan sawah yang luas. Sebelum dibangunnya Cafe Sawah ini.

Keberhasilan objek wisata café sawah tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Kepala Desa dengan POKDARWIS yang terus mengelola dan mengembangkan Potensi yang berada di objek wisata Cafe Sawah. Berbagai alternative pengembangan yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Cafe Sawah dalam meningkatkan kualitas wisata terus dilakukan. Kegiatan seperti kampanye sadar wisata, kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, perangkat desa dan masyarakat Desa Pujon Kidul untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang dimiliki. Namun dibalik keberhasilan objek wisata café sawah, terdapat kendala pada pengelolaan potensi wisata lain yang terdapat pada Desa Wisata Pujon Kidul yaitu sebagai berikut;

5.1.2.(b) Kendala Pelaksanaan Pada Mengembangkan Objek Wisata di Desa Wisata Pujon Kidul

Dalam pelaksanaan pengembangan Desa Wisata terdapat kendala terkait pengembangan objek wisata yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi wisata Desa Pujon Kidul namun tidak dikelola atau dimaksimalkan dengan baik karena kendala dari partisipasi masyarakat, tidak seperti pengelolaan objek wisata café sawah yang terbilang sangat baik dengan adanya kerjasama

yang baik antara Pemerintaah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa, dan masyarakat.

Pada pengelolaan objek wisata lain tidak terjalin kerjasama yang baik sehingga potensi wisata yang masih dimiliki Desa Pujon Kidul tidak dapat dikelola dan dimaksimalkan dengan baik seperti objek wisata café sawah karena kendala kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga terjadi kurangnya sumber daya manusi untuk mengembangkan desa wisata dalam mengelola dan memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Pujon Kidul. Hal ini menyebabkan potensi wisata Pujon Kidul yang tersisa seperti wisata edukasi petik sayur, wisata perah susu sapi, sumber maron, wisata outbound tidak dapat di maksimalkan sehingga tidak dapat mencapai keberhasilan seperti Wisata Alam Café Sawah yang ramai di datangi pengunjung. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul dalam pernyataannya yaitu.⁹³

“kuncinya supaya berhasil itu ya itu tadi mbak, peran dari masyarakat itu sangat penting. Ini masalah yang kita hadapi, dimana sumber daya manusia kita sangat terbatas. Hal seperti itu terjadi karena cara berfikir mereka yang tidak dapat berkembang. Jika diajak bicara soal desa wisata, yang mereka tau adalah Kota Batu padahal konsep desa wisata yang sebenarnya tidak seperti itu. Selain itu bagi masyarakat yang tidak biasa melakukan kegiatan dalam bidang pariwisata yang di lihat itu ya yang mereka kerjakan setiap hari, dimana mereka berfikir bahwa untuk apa mengelola desa wisata dan lain sebagainya jika dengan petani dan beternak saja masih bisa hidup. Padahal di adakannya desa wisata ini tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan mereka tapi tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan mereka. Jadi butuh proses supaya mereka bisa memahami apa itu desa wisata.”

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa alasan masyarakat tidak mengelola dan memaksimalkan potensi melimpah yang dimiliki Desa Pujon Kidul adalah karena ketidakpahaman masyarakat mengenai konsep desa wisata serta karena mindset masyarakat yang tidak berkembang, dimana mereka beranggapan bahwa adanya pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul tidak begitu penting bagi kehidupan mereka dan karena mereka sudah puas dengan pendapatan mereka yang serba cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperoleh dari hasil bertani dan berternak.

Masyarakat hanya berpatok pada sektor pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama mereka. Ketidakpahaman masyarakat mengenai konsep desa wisata yang mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat tentunya sangat menghambat dalam pelaksanaan pembangunan pada pengembangan Desa Wisata padahal Desa Pujon Kidul memiliki potensi yang melimpah yang belum di kelola secara maksimal seperti pengelolaan pada Wisata Alam Café Sawah. Sampai saat ini Kepala Desa Pujon Kidul menyatakan masih mengalami kesulitan dalam meyakinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengembangkan Desa Wisata.

Dengan adanya kendala tersebut, Pemerintah Desa Pujon Kidul harus lebih aktif melakukan pendampingan seperti mengadakan sosialisasi dan monitoring mengenai desa wisata agar masyarakat paham mengenai konsep desa wisata untuk meningkatkan minat seluruh masyarakat Desa agar sumber daya manusia yang ikut berpartisipasi untuk terus mengembangkan desa wisata dapat semakin meningkat sehingga menjadikan Desa Wisata Pujon Kidul semakin diminati banyak wisatawan.

Selain itu Pemerintah Desa Pujon Kidul juga diharapkan dapat menggerakkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada serta mempergunakan dana yang lebih untuk dapat mengembangkan potensi wisata di Desa Pujon Kidul yang melimpah dan belum di kelola secara maksimal menjadi berbagai atraksi wisata yang di kembangkan berdasarkan kearifan lokal masyarakat untuk lebih menarik minat wisatawan seperti atraksi wisata café sawah.

5.1.3 Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul

Pada aspek pengambilan keputusan dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang di lakukan di Desa Pujon Kidul terdapat kelebihan yang tentunya harus di pertahankan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul. Kelebihan tersebut yaitu dimana Pemerintah Desa Pujon Kidul selalu berperan aktif untuk mengajak dan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa agar tercapai kesepakatan bersama untuk membangun Desa menjadi Desa wisata seperti yang terlihat pada gambar 5.2 sebagai berikut:

Gambar 5.2 Sosialisasi dan Musyawarah Desa



Sumber : diolah penulis dari “pujonkidul.desa.id”

Kelebihan lain juga tergambar pada usaha Pemerintah Desa yang juga aktif dalam mengadakan kegiatan pengambilan keputusan dengan memaksimalkan

kesempatan yang ada seperti adanya kegiatan atau kearifan lokal tahlil kubro yang kemudian dijadikan wadah untuk memusyawarahkan mengenai pembangunan Desa Wisata yang terlihat pada gambar 5.5 sebagai berikut:

Gambar 5.3 Sambutan Kepala Desa dalam acara Tahlil Kubro



Sumber : diolah penulis dari "pujonkidul.desa.id"

Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan atau kekurangan pada proses pengambilan keputusan yang harus diperbaiki. Kelemahan tersebut terdapat pada tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang telah diambil dalam upaya membangun Desa Wisata yang sangat kurang, dimana masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai konsep desa wisata. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan. Kendala tersebutlah yang kemudian harus diperbaiki oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kelebihan yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah Desa yaitu berhasilnya Kepala Desa dalam menggerakkan dan mengikutsertakan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa untuk bekerja sama membangun Desa Wisata. Meskipun begitu masih terdapat kelemahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaannya yang harus diperbaiki. Kekurangan tersebut karena adanya kendala partisipasi masyarakat. Pemerintah desa belum dapat menggerakkan seluruh masyarakat untuk bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan Desa Wisata.

Adanya kendala atau kekurangan dalam tata kelola Pemerintahan Desa pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam pengembangan Desa Wisata seperti yang dijelaskan diatas kemudian mengharuskan Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi guna menangani kendala tersebut agar tidak berkelanjutan serta untuk menutupi kelemahan ataupun kekurangan yang ada . Bahan evaluasi tersebut dijadikan patokan oleh Pemerintah Desa agar dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Desa Wisata kedepannya.

Evaluasi tersebut di dapat dari penyerapan aspirasi serta kritik dan saran yang di berikan masyarakat yang kemudian dituliskan dalam dokumen RKP Desa dengan menjabarkan segala capaian kinerja pada program pembangunan desa yang telah dilakukan, serta menguraikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya untuk kemudian dapat di musyawarahkan bersama masyarakat di Balai Pertemuan Desa Pujon Kidul untuk di selesaikan dan dicari jalan keluar terbaik terkait permasalahan tersebut dan menanggapi kritik serta saran dari masyarakat dalam pelaksanaan program desa wisata tersebut untuk mencapai tata kelola Pemerintahan yang lebih baik kedepannya sebagai upaya keberlanjutan dari kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

Pada periode selanjutnya, Pemerintah Desa Pujon Kidul lebih memfokuskan untuk memberikan lebih banyak sosialisasi mengenai desa wisata kepada Masyarakat agar seluruh Masyarakat paham mengenai konsep desa wisata yang diusung oleh Pemerintah Desa, dan agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam memaksimalkan potensi yang di miliki oleh Desa Pujon Kidul.

Dari seluruh pembahasan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan suatu proses politik yang dilakukan dalam tata kelola

pemerintahan desa wisata Pujon Kidul dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar tercapai pembangunan desa wisata yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Dikatakan proses politik karena dalam tata kelola pemerintahan desa wisata Pujon Kidul terdapat pola-pola atau tahapan-tahapan politik yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat desa dalam mengatur pembangunan desa wisata. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan dari masyarakat desa dan pemerintah desa Pujon Kidul itu sendiri untuk menjadikan Desa Pujon Kidul sebagai Desa Wisata agar dapat mensejahterakan masyarakat desa serta input berupa aspirasi masyarakat dan juga dukungan maupun partisipasi dari masyarakat agar dapat mensukseskan konsep desa wisata yang telah diusung bersama-sama. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Dari seluruh pemaparan diatas tersebut dapat diketahui bahwa pada kenyataannya, Desa Wisata Pujon Kidul lahir dan berkembang bukan dari berhasilnya tata kelola Pemerintahan Desa namun dari kepemimpinan Kepala Desa yang bekerja keras mewujudkan program Desa Wisata dengan berperan aktif sebagai inspirator, motivator, sekaligus fasilitator dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul secara partisipatif dengan merangkul kelompok pemuda yang tergabung dalam POKDARWIS untuk mengembangkan Desa Wisata hingga maju dan berhasil seperti sekarang.

5.2 Dampak Pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul Terhadap Kualitas Hidup

Masyarakat Desa

Tujuan dari adanya pengelolaan pariwisata melalui pengembangan desa wisata adalah dapat meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup dapat dinilai dari beberapa indikator diantaranya adalah kualitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dampak dari pengelolaan desa wisata dirasakan langsung oleh sebagian masyarakat di Desa Pujon Kidul yaitu masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata terutama masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan café sawah Pujon Kidul. Oleh sebab itu Wisata Alam Café Sawah sampai saat ini menjadi produk unggulan Desa Pujon Kidul yang banyak menarik minat wisatawan.

Membahas mengenai dampak, adapun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pujon Kidul terkait pengelolaan Desa Wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 APBDes terkait pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul Tahun 2017

URAIAN	ANGGARAN
Pendapatan	Jumlah (Rp)
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.85.000.000
Objek Wisata Café Sawah	Rp.75.000.000
Lain-lain PAD yang sah	Rp.10.000.000
Pendapatan Transfer	Rp.832.972.000
Dana Desa	Rp.832.972.000
Pendapatan lain-lain	Rp. 31.500.000
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 31.500.000
Jumlah pendapatan	Rp.918.003.500
Belanja	Jumlah (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.182.400.000
Operasional BPD	Rp.18.800.000
Operasional RT/RW	Rp.33.600.000
Operasional perkantoran	Rp.130.000.000
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.455.995.000
Pembangunan sarana lingkungan	Rp.34.570.000
Pembangunan Jalan	Rp.253.000.000

Sarana dan prasarana Desa Wisata	Rp.168.425.000
Bidang Pembinaan	Rp.139.050.000
Keamanan dan ketertiban	Rp.20.000.000
PKK	Rp.45.950.000
Sosial dan Budaya	Rp.73.100.000
Jumlah Belanja	Rp.777.445.000
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.50.000.000
Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa	Rp.50.000.000

Sumber: diolah penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017”

5.2.1 Kualitas Ekonomi

5.2.1.(a) Peningkatan Pendapatan

Sejauh ini, keberhasilan Desa Wisata dapat dilihat dari keberhasilan Wisata Alam Café Sawah yang terbilang cukup mampu memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup dari segi pendapatan/ekonomi. seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul:⁹⁴

“Bagaimana tidak meningkatkan pendapatan toh mbak, omzet kita di café sawah ini saja per/harinya kalau weekday sekitar 10-12 juta, sedangkan weekendnya di hari sabtu itu sekitar 15-18 juta, kemudian di hari minggu mencapai 30-40 juta, dari situ jelas terjadi peningkatan pendapatan.”

Dan di perkuat pula dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:

“dari segi perekonomian jelas ada peningkatan. Jumlah rumah tangga miskin berkurang, karena mereka yang biasanya hanya bertani tidak ada penghasilan tambahan sekarang punya tambahan dari adanya wisata ini, mereka bisa berjualan”.⁹⁵

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa adanya desa wisata khususnya Wisata Alam Café Sawah memang berdampak terhadap pendapatan yang dapat

⁹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.37

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.46

dirasakan langsung oleh masyarakat. Dimana yang dulu awalnya hanya mengandalkan penghasilan dari bertani dan beternak sekarang mendapatkan penghasilan tambahan dari membuka kios dan berdagang pada objek wisata yang ada di Desa Pujon Kidul. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Ertifa selaku pedagang buah di wisata café sawah pujon kidul:

“ya ada perubahanlah mbak pastinya semenjak ada café sawah ini saya sekarang ada kerjaan ada pendapatan. Ya jualan seperti sekarang ini, saya dulunya kan hanya ibu rumah tangga biasa mbak, kadang kalau di perlukan ya merangkap jadi buruh tani.”⁹⁶

Selain itu narasumber lain juga memberikan penjelasan yang hampir serupa, yaitu pernyataan dari Ibu Payama Selaku pedagang makanan dan minuman di wisata café sawah: “ya Alhamdulillah mbak, café sawah ini sangat membantu. Yang dulunya berkecukupan sekarang lumayan ada sisa-sisa uang bisa untuk nabung.”⁹⁷

Pernyataan dari kedua narasumber diatas menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dari adanya desa wisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan desa wisata dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata khususnya pada wisata café sawah tersebut, artinya dampak ekonomi dari adanya café sawah tidak menyentuh secara keseluruhan. Dimana yang merasakan dampak ekonomi secara langsung adalah kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sebagai pengelola dan sebagian

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.40

⁹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Payama, selaku pedagang makanan dan minuman di wisata café sawah, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 11.56

masyarakat yang berpartisipasi sebagai elemen penting dalam pengembangan Desa Wisata.

Dapat dilihat bahwa terjadi peristiwa saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah desa. Jika masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata maka wisata yang di kelola akan berkembang dengan baik sehingga dapat merangsang peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Sektor pariwisata yang di kemas dalam konsep desa wisata memiliki muatan ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

5.2.1.(b) Penyerapan Tenaga Kerja

Selain berdampak pada peningkatan pendapatan, adanya Desa Wisata juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dimana terjadi upaya pemberdayaan masyarakat sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul:⁹⁸

“Desa wisata ini, lebih tepatnya lagi café sawah itu menyerap tenaga kerja mbak, sampai saat ini kita ada 65 orang itu yang bekerja di pelayanan. Mereka merupakan putra daerah, selain orang asli Pujon Kidul mereka tidak bisa masuk kesini, tidak bisa bekerja disini. Selain 65 orang itu tambah lagi ada penjaga malam 30 orang kemudian tenaga lepasnya ada 10 orang”.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.37

Dan pernyataan tersebut di perkuat pula dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:⁹⁹

“betul sekali, tidak bisa dielakkan bahwasanya desa wisata ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dimana angka pengangguran juga berkurang karena adanya desa wisata ini menyerap banyak tenaga kerja. Itu akan berpengaruh pada kualitas hidup mereka.

Pengembangan Desa Wisata merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pariwisata melalui pengembangan tenaga terampil. Strategi pengembangan sumber daya pariwisata dimulai dari manusianya terlebih dahulu, dengan tujuan pengelola pariwisata memiliki kualitas keterampilan yang baik di bidang pariwisata. Selain itu juga ada strategi pengembangan sumber daya manusia dalam pariwisata. Sehingga harapannya masyarakat akan memiliki kesadaran dalam usaha pariwisata dan mau mengembangkan pariwisata di daerahnya.

5.2.2 Kualitas Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting. Tingkat kesehatan manusia dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis dan fasilitas sosial lainnya, serta tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan seperti lingkungan yang sehat dan makanan yang bergizi.¹⁰⁰

Kualitas kesehatan di Desa Pujon Kidul dari segi sarana prasarana sudah cukup memadai. Terdapat sebuah Polindes dan 5 buah Posyandu di Desa Pujon Kidul dan beberapa jumlah tenaga kesehatan yang dapat dilihat pada tabel 5.1:¹⁰¹

⁹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.46

¹⁰⁰<https://www.gurugeografi.id/2016/11/3-indikator-kualitas-hidup-manusia.html>

¹⁰¹Skripsi zakiyah, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Pujon Kidul. 2015 (diakses pada 30 juli 2018 pukul 22.00)

Tabel 5.2 Jumlah tenaga kesehatan

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	-
2	Bidan	1
3	Mantri	1
4	Ahli gizi	-
5	Perawat	1
6	Kader	33

Sumber: diolah oleh penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017”

Namun kualitas kesehatan tidak hanya diukur dari sarana prasarana yang tersedia tapi juga dengan cara mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dengan mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit dan keahlian tenaga kesehatan yang ada. Dari laporan yang ada menunjukkan bahwa:

a. Penyakit Terbanyak

Masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi yang disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat.

b. Cacat

Selain itu terdapat orang cacat mental dan fisik yang juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 1 orang, tuna wicara 3 orang, tuna rungu 3 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Pujon Kidul.

c. Balita Gizi Buruk

Dari jumlah 358 balita di Desa Pujon Kidul, terdapat 3 balita bergizi buruk dan 7 balita kurang, sedangkan sisanya sedang.

Penjabaran diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Pujon Kidul. Hal itu dikarenakan kurangnya keahlian dari tenaga kesehatan yang ada serta lingkungan yang tidak bersih. Masih banyak rumah yang menggabungkan dapurnya dengan kandang sapi sehingga mengakibatkan lingkungan yang tidak bersih dan tidak baik bagi kesehatan. Selain itu Tingkat pengetahuan kader masih kurang tentang Posyandu, Anemia, GAKI, KVA dan PMT. Sedangkan untuk tingkat keterampilan kader masih dalam kategori kurang dalam menimbang berat badan balita menggunakan baby scale, dacin dan timbangan injak, mengukur tinggi badan menggunakan microtoice, mengukur lingkar kepala, LLA, pencatatan dan pelaporan pada pengisian KMS.

Adanya permasalahan diatas karena tata kelola pemerintahan desa wisata tidak berdampak pada tata kelola kesehatan serta karena kurang signifikannya peran Desa Wisata Pujon Kidul dalam menyumbang dan mempergunakan uang kas desa yang di dapatkan dari hasil usaha desa yaitu desa wisata untuk meringankan masalah kesehatan di Desa Pujon Kidul. Hal tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Desa Pujon Kidul

No.	Sumber Pendapatan	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha (Bumdes, kas Desa)	Rp.75.000.000
2	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa Lain-lain Yang sah	Rp.10.000.000
3	Pendapatan Transfer	Dana Desa	Rp.832.972.000
4	Pendapatan Transfer	Hasil pajak dan retribusi daerah	Rp.25.021.412

5	Pendapatan transfer	Alokasi Dana Desa	Rp.491.651.000
6	Pendapatan Transfer	Bantuan Keuangan (Provinsi, Kabupaten)	Rp.32.117.500
7	Pendapatan Lain-lain	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp.31.500.000

Sumber: diolah penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017 Desa Pujon Kidul”

Pada tabel diatas terdapat pendapatan asli desa yang di dalamnya ada yang berasal dari hasil usaha desa dari Bumdes dan kas desa yang jumlahnya lumayan besar yaitu Rp.75.000.000. Namun sayangnya dari jumlah tersebut tidak tercantum dalam catatan belanja desa atau pengeluaran desa yang artinya Desa Wisata memang tidak signifikan perannya dalam menyumbangkan kas desa untuk meringankan masalah kesehatan di Desa Pujon Kidul seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Belanja Desa

No.	Uraian	Sumber	Jumlah
1	Pembangunan sarana lingkungan	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.34.570.000
2	Pembangunan jalan	Dana Desa (DD)	Rp.253.385.000
3	Sarana dan prasarana kesehatan	Dana Desa (DD)	Rp.21.150.000
4	Keamanan dan ketertiban	Dana Desa (DD)	Rp.20.000.000
6	Pemberdayaan (kesehatan)	Dana Desa (DD)	Rp.57.610.000

Sumber : Diolah oleh penulis dari “Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017 Desa Pujon Kidul”

Dari data diatas terlihat bahwa adanya pengeluaran atau belanja desa pada bidang kesehatan bersumber pada Dana Desa yang merupakan dana dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa,¹⁰² sehingga bukan dari pendapatan asli desa atau kas desa yang di hasilkan dari usaha desa yang dalam hal ini adalah desa wisata .

Berdasarkan penjelasan diatas, diharapkan Pemerintah Desa Pujon Kidul dapat memperbaiki kualitas kesehatan terutama tenaga kesehatan dengan yang benar-benar memahami mengenai ilmu kesehatan, serta pemerintah juga harus rutin mengadakan kerja bakti atau lomba kebersihan lingkungan untuk menggerakkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit.

5.2.3 Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat dilihat berdasarkan strata pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang tersedia seperti berikut:

5.2.3.(a) Strata Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator penting dalam mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat kecakapan yang akan memicu tumbuhnya keterampilan dan lapangan kerja. Dengan adanya pendidikan yang baik pula akan dapat mengembangkan pola pikir individu misalnya tentang pengembangan desa wisata karena dapat lebih mudah menerima informasi maupun sosialisasi dan monitoring yang diberikan oleh pemerintah Desa. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Pujon Kidul:

Tabel 5.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pujon Kidul

No.	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas	144 orang
2	Tidak Tamat SD	140 orang

¹⁰²<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, diakses pada 6 september 2018 pada pukul 11.06

3	Tamat SD	1.081 orang
4	Tamat SMP	117 orang
5	Tamat SMA	75 orang
6	D III	2 orang
7	S1	6 orang

Sumber: Pemerintah Pujon Kidul, diolah oleh penulis

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Pujon Kidul hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hingga pendidikan sekolah dasar (SD). Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul:¹⁰³

“kalau bicara masalah pendidikan kita masih kurang mbak. Se-desa Pujon Kidul ini yang lulusan S1 bisa dihitung dengan jari. Mungkin hanya sekitar 5 orang termasuk saya”.

Terkait tingkat pendidikan masyarakat Pujon Kidul, Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul juga memberikan pernyataan bahwa:¹⁰⁴

“pendidikan masih kurang sepertinya mbak. Yang di pekerjaan di wisata alam café sawah ini saja itu dari 65 orang 80% nya itu adalah anak-anak putus sekolah, dan sisanya hanya lulusan SD dan SMP. disini strata pendidikan itu sangat rendah.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Pujon Kidul masih rendah karena banyaknya jumlah anak putus sekolah yang merupakan lulusan SD.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.46

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.40

5.2.3.(b) Sarana Prasana Pendidikan

Kualitas pendidikan di Desa Pujon Kidul rendah karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia masih belum memadai seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Sarana Pendidikan Desa Pujon Kidul Tahun 2013-2018

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
Formal		
1.	Play Group	1
2.	TK	3
3.	SD/Sederajat	3
4.	SMP/Sederajat	1
5.	SMA/Sederajat	-
Non Formal		
1.	TPQ	2

Sumber: diolah penulis dari “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul*”

Tingkat pendidikan di Desa Pujon Kidul masih rendah akibat kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Hanya tersedia beberapa sekolah tingkatan SD, sedangkan untuk tingkatan SMP hanya ada 1 unit dan SMA berada di tempat yang relatif jauh sehingga mengakibatkan banyak anak putus sekolah.

Jumlah anak putus sekolah di Desa Pujon Kidul sebelum dan sesudah adanya desa wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 Anak Putus Sekolah di Desa Pujon Kidul

No.	Strata	Sebelum	Sesudah
1	SD	2.331 orang	1.081 orang
2	SLTP	612 orang	117 Orang
3	SLTA	248 orang	75 orang

Sumber: *Pemerintah Pujon Kidul, diolah oleh penulis*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi pengurangan pada jumlah anak putus sekolah di Desa Pujon Kidul sebelum dan sesudah adanya desa wisata.

Hal tersebut karena adanya desa wisata pujon kidul cukup signifikan dampaknya terhadap pendidikan di Desa Pujon Kidul akibat adanya penggunaan APBDesa Pujon Kidul untuk pembangunan pendidikan baik dari segi sarana prasarana pendidikan maupun pada segi pemberdayaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Daftar Penggunaan APBD Desa Pujon Kidul Pada Bidang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Tahun
1	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp.8.720.000	2016
2	Pembangunan Ruang Kelas SMPN 3 Pujon	Rp.10.500.000	2014
3	Keramik Gedung Paud	Rp.8.000.000	2015
4	Pemberdayaan	Rp.5.400.000	2016

Sumber : Diolah oleh penulis dari “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017 Desa Pujon Kidul*” dan “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul*”

Data di atas menunjukkan adanya dampak tidak langsung desa wisata terhadap aspek pendidikan dengan sumbangan APBD desa wisata terhadap pembangunan sarana prasarana pendidikan, namun dilihat dari dampak langsungnya yaitu dampak tata kelola pemerintahan desa wisata belum berdampak terhadap tata kelola pendidikan. Hal tersebut terlihat pada tata kelola pendidikan dari sebelum hingga sesudah adanya Desa Wisata yang cenderung tidak ada perubahan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan karena dalam sebuah Desa mencakup berbagai bidang, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, maupun Kemasyarakatan yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Maka dari itu, tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik diperlukan agar dapat tercapai Desa Wisata yang berhasil dan dapat mensejahterakan Desa serta masyarakat di Desa itu sendiri. Dari uraian diatas yang menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan Desa Wisata Pujon Kidul serta Dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat Desa dengan penerapan Village Governance di Desa Pujon Kidul, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pada aspek pengambilan keputusan dalam pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul, Pemerintah Desa melibatkan masyarakat pada musyawarah desa yang juga dilakukan pada kegiatan seperti kegiatan pemetaan/mapping dan kearifan lokal yaitu Tahlil kubro.

Kedua, Dalam pelaksanaan keputusan pada tata kelola pemerintahan desa wisata, Pemerintah Desa melibatkan Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa Pujon Kidul dan juga berupaya memberdayakan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi, namun tidak semua masyarakat mendukung dan ikut berpartisipasi karena kurangnya pemahaman mengenai Desa Wisata dan karena kurangnya mindset dari masyarakat.

Ketiga, Adanya kendala membuat Pemerintah Pujon Kidul berupaya untuk mengevaluasi kekuatan maupun kekurangan yang terdapat pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan dengan meningkatkan yang sudah berjalan baik dan memperbaiki yang masih kurang. Evaluasi tersebut didapat dari penyerapan aspirasi serta kritik dan saran yang diberikan masyarakat untuk memperbaiki kinerja yang masih kurang dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi-sosialisasi mengenai desa wisata.

Keempat, Dampak yang di hasilkan dari penerapan Village Governance atau tata kelola Pemerintahan Desa berdasarkan aspek pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kurang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas ekonomi dengan adanya peningkatan pendapatan yang tidak menyentuh masyarakat secara keseluruhan melainkan hanya dirasakan oleh masyarakat yang berpartisipasi pada Desa Wisata.

Kelima, Dampak tata kelola pemerintahan desa pada Kualitas pendidikan di Desa Pujon Kidul tidak cukup baik. Strata pendidikan di Desa Pujon Kidul masih rendah karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia masih belum memadai sehingga banyak anak putus sekolah dan sebagian besar masyarakat Pujon Kidul hanya bersekolah sampai lulus Sekolah Dasar (SD).

Keenam, Dari segi kesehatan juga belum terbilang baik atau dampaknya tidak signifikan karena kurangnya tenaga kesehatan yang benar-benar ahli serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan. Adanya permasalahan tersebut karena memang kurang signifikannya peran Desa Wisata Pujon Kidul dalam menyumbang dan mempergunakan uang kas desa yang didapatkan dari

hasil usaha desa yaitu desa wisata untuk meringankan masalah kesehatan di Desa Pujon Kidul.

Ketujuh, Secara keseluruhan, dampak dari bekerjanya tata kelola pemerintahan desa wisata di Desa Pujon Kidul belum berdampak pada tata kelola pendidikan, kesehatan, dan ekonomi baik dampak langsung maupun tidak langsung. Pada dampak langsung tidak terlihat perubahan pada tata kelola pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi dari sebelum adanya Desa Wisata hingga sesudah adanya Desa Wisata. Pada dampak tidak langsung terdapat kurang memadainya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada Peneliti Selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini, penulis sampai pada pembahasan mengenai mekanisme dalam tata kelola pemerintahan Desa Wisata pada pengembangan Desa Wisata serta pembahasan tentang kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagai dampak dari adanya pengembangan Desa Wisata di Desa Pujon Kidul. Dari hasil yang penulis dapatkan pada penelitian ini, terdapat beberapa pembahasan yang belum tersentuh lebih dalam yaitu mengenai kegiatan Tahlil Kubro sebagai acara kerohanian yang tidak hanya dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi namun juga sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya penemuan tersebut maka dirasa perlu untuk diadakan penelitian selanjutnya yang membahas lebih dalam mengenai Tahlil Kubro di Desa Pujon Kidul.

- b. Selain itu pembahasan lain yang kurang tersentuh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan Kepala Desa dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul dan mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata secara lebih terperinci, maka dengan adanya kekurangan ini, peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji mengenai hal tersebut dengan lebih baik dan lebih lengkap lagi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia(Yogjakarta: Graha Ilmu, 2014), 62.
- Astuti Dewi. 2010. Manajemen Keuangan Perusahaan. Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia. Hlm.15
- Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997). 348
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hariadi, Pramono, et.al, 2010, Pengelolaan Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta. Hal 2
- Himawan S Pambudi, dkk, 2001, Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23
- Nurcholis Hanif, 2011, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hal 75
- Prof. Dr. Robert K.Yin (2014), "*Studi Kasus (desain & metode)*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi, Fokusmedia, Bandung. Hal 1
- Sudharto P. Hadi. 1995. Aspek Sosial Amdal. Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.
- Suratmo, Gunarwan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Halaman:24

PERATURAN DAN SUMBER HUKUM

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23
tentang desa

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94

Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

INTERNET

Erwin. (Skripsi): *“tata kelola pemerintahan desa dalam negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang Undang nomor 6 tahun 2014”*, [http:// Bab%25203%2520Erwin%2520reff.pdf](http://Bab%25203%2520Erwin%2520reff.pdf), hlm.7, (diakses pada 10 mei 2018 pukul 14.00 WIB)

Dicktus (2013) “Definisi, Dampak, Pengendalian Hujan Asam Niken”, Diakses Dari <http://www.scribd.com/search?query=definisi+dampak>, Diakses pada 12 oktober 2018

<http://journal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Pembangunan/article/view/48>.
[diakses pada 24 november 2017]

<https://m.medcom.id/jawa-timur/peristiwa-jatim/8Ky4QEXk-bermodalkan-dana-desa-pujon-kidul-jadi-tujuan-wisata> (diakses pada 12 oktober 2018)

<http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/pembaharuan-penyelenggaraan.html> (diakses pada 13 mei 2018 , pukul 09.11 WIB)

<http://travel.kompas.com> (diakses pada rabu 2 Oktober 2018, pukul 10:01 WIB)

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/dengan> [Diakses 12 oktober 2018].

Soekarya, Titien. (2011). *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa wisata. Tersedia di* (<http://www.kemenpar.go.id/asp/detail.asp?c=100&id=2982>, diakses 24 november 2017

Tahlil Kubro Sebagai Sarana Silaturahmi dan Membangun Mental” diakses dari <http://D:/Tahlil%20Kubro%20Sebagai%20Sarana%20bersilaturrahi%20d>

[an%20Membangun%20Mental%20-%20Desa%20Wisata%20Pujon%20Kidul.html](https://tunas63.wordpress.com/2009/12/27/tujuan-tugas-dan-fungsi-karang-taruna/) pada 14 mei 2018 pukul 14.45

Tujuan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna” diakses dari <https://tunas63.wordpress.com/2009/12/27/tujuan-tugas-dan-fungsi-karang-taruna/> pada 16 mei 2018 pukul 12.29 WIB

“Kebijakan”, <https://id.wikipedia.org>. Di Akses 02 Desember 2017 pukul 12.26
www.bps.go.id [di akses pada 24 oktober 2017 pukul 21.12]

DOKUMEN

Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pujon Kidul Periode Tahun 2011-2017*).

Dokumen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam “*Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2017*”.

JURNAL

According to a survey by Rural Development Institute of Chinese Academy of Social Sciences, township-village land disputes have become a focal point of villagers’ protest replacing disputes over fees as the number one issue. See, Yu Zhengrong [65].

Afuwat Ayu Wibowo, (2012), pengembangan desa wisata sebagai model pemberdayaan masyarakat di desa brayut kabupaten Sleman, provinsi DIY, jurnal nasional pariwisata. Vol.4 No.1

The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, J.A.C. Vela,b* and A.W. Bednerb, *Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law* 2015 Vol. 47, No. 3, 493507, <http://dx.doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>

Qingshan Tan, Why Village Election Has Not Much Improved Village Governance. Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Studies 2010, Hal.153-154

Wiwin Indarti, S.S., M.Hum, drh. Arya Mahdi, dan Tri Mulyati, M.Pd, Pengembangan Program Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Udi Hartoko, selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada, tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.33

Hasil wawancara dengan Bapak Ibadurrahman, selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul pada , tanggal 14 Februari 2018 pukul 12.37

Hasil wawancara dengan Ibu Ertifa, selaku pedagang buah di wisata café sawah, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 11.56

Hasil wawancara dengan Ibu Payama, selaku pedagang makanan dan minuman di wisata café sawah, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 11.56

SKRIPSI

Sutiyono, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tyas Pratiwi. (2008). *Potensi Karanggeneng sebagai Desa Wisata di Sleman*. Tugas Akhir Program Diploma III Bahasa Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Widi Kurniawan. (2005). *Sentra Pengemabangan Desa Wisata di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman*. Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Zakiah. (2015) “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Pujon Kidul*.”

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian:



Gambar 1. Kantor Desa Pujon Kidul



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ibadurrahman selaku Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekaligus *Manager Marketing* objek wisata café sawah Pujon Kidul



Gambar 4. Pedagang di objek Wisata Café Sawah Pujon Kidul yang terkena dampak langsung dari adanya Desa Wisata



Gambar 5. Pedagang di objek Wisata Café Sawah Pujon Kidul yang terkena dampak langsung dari adanya Desa Wisata